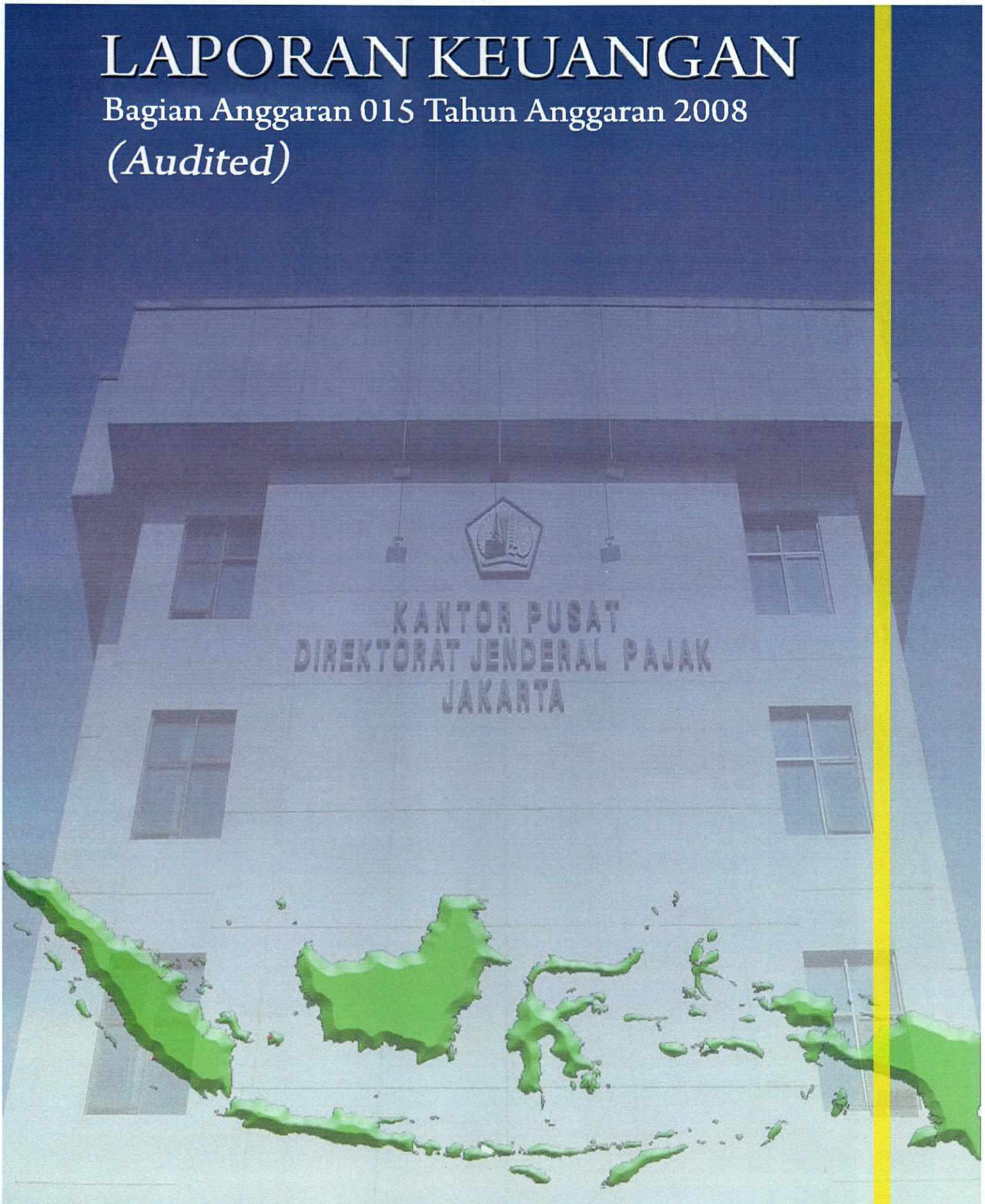
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2008

(Audited)



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGIAN ANGGARAN 015

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2008

(Audited)

Jl . Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 Mei 2009
a.n Direktur Jenderal
a. Sekretaris Direktorat Jenderal

DJONIFAR ABDUL FATAH
NIP 060045217

9. **Pernyataan Tanggung Jawab**

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan eselon I setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. **Ringkasan**

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. **Laporan Realisasi Anggaran Eselon I**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. **Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Eselon I.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
   i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
   ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
   iii) Neraca Percobaan
   (daftar laporan lihat lampiran III)

b. Laporan barang pengguna
   i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
   ii) Laporan Kondisi Barang *(khusus LKKL Tahunan)*
   iii) Rincian Saldo Awal
   (daftar laporan lihat lampiran III)

c. Laporan Rekening Pemerintah

d. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

e. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan Eselon I dll.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 41 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp571.015.136.834.249,00 atau 106,82 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008. Sementara itu, realisasi Belanja Negara Netto tanpa memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp3.206.950.764.116,00 atau 71,19 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2008.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp56.411.609.187.631,00 dan Kewajiban sebesar Rp313.267.702.980,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Direktorat Jenderal Pajak per 31 desember 2008 adalah sebesar Rp56.098.341.484.651,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).* Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 29 Mei 2009
a.n Direktur Jenderal
o. Sekretaris Direktorat Jenderal

DJONIFAR ABDUL FATAH
NIP 060045217

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	x
Daftar Singkatan	xi
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiv
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan 2008 dan 2007)	4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2008 dan 2007)	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Eselon I	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	21
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.3. Catatan Penting Lainnya	38
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Penjelasan Umum Neraca	39
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	40
C.3. Catatan Penting Lainnya	74
D. Pengungkapan Penting Lainnya	75
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI T.A. 2007	75
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI T.A. 2008	75
D.3. Rekening Pemerintah	78
V. Lampiran	
• Neraca Percobaan	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan	
• Laporan Kondisi Barang	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007	2
Tabel I.2	Neraca per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007	2
Tabel IV.A.1	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	9
Tabel IV.A.3.1	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-SAK	10
Tabel IV.A.3.2	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-BMN	12
Tabel IV.B.1.1	Pendapatan dan Belanja Tahun 2008	21
Tabel IV.B.1.2	Pendapatan dan Belanja Bruto Tahun 2008	22
Tabel IV.B.1.3	Pendapatan dan Belanja Netto Tahun 2008	22
Tabel IV.B.2.1	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Tahun 2008 dan 2007	23
Tabel IV.B.2.1.1	Realisasi Pendapatan Bruto per Kantor Wilayah	25
Tabel IV.B.2.1.2.a	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008	26
Tabel IV.B.2.1.2.b	Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008	27
Tabel IV.B.2.1.2.c	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	27
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Bukan Pajak Bruto Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	28
Tabel IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	29
Tabel IV.B.2.2.2.	Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil Tahun Anggaran 2008	32
Tabel IV.B.2.2.3.a	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi TA 2008	33
Tabel IV.B.2.2.3.b	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	34
Tabel IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2008	34
Tabel IV.B.2.2.4.a	Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	35
Tabel IV.B.2.2.4.b	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2008	36
Tabel IV.B.2.2.4.c	Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	36
Tabel IV.B.2.2.4.d	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2008	37
Tabel IV.B.2.2.4.e	Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	37
Tabel IV.B.2.2.5	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga T A 2008 dan TA 2007	37
Tabel IV.B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja TA 2008	38
Tabel IV.B.2.2.7	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2008	38
Tabel IV.C.1	Neraca per 31 Desember TA 2008 dan 2007	39
Tabel IV.C.2.1.1	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2008 dan 2007	40
Tabel IV.C.2.1.2	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2008 dan 2007	42
Tabel IV.C.2.1.3.a	Rincian Piutang Pajak per Kanwil per 31 Desember 2008	43
Tabel IV.C.2.1.3.b	Rincian Piutang Pajak per Jenis TA 2008 dan 2007	44
Tabel IV.C.2.1.3.c	Rincian Piutang Pajak per Umur per 31 Desember 2008	44
Tabel IV.C.2.1.4	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2008 dan 2007	46
Tabel IV.C.2.1.5	Bagian Lancar TGR per 31 Desember TA 2008 dan 2007	47

Tabel IV.C.2.1.6	Persediaan per 31 Desember TA 2008 dan 2007	48
Tabel IV.C.2.2	Aset Tetap per 31 Desember 2008 dan 2007	49
Tabel IV.C.2.2.1	Rincian Aset Tetap – Tanah per Kanwil per 31 Desember 2008	51
Tabel IV.C.2.2.2	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Kanwil per 31 Desember 2008	53
Tabel IV.C.2.2.3	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Kanwil per 31 Desember 2008	55
Tabel IV.C.2.2.4	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per Kanwil per 31 Desember 2008	57
Tabel IV.C.2.2.5	Rincian Aset Tetap – Irigasi per Kanwil per 31 Desember 2008	59
Tabel IV.C.2.2.6	Rincian Aset Tetap – Jaringan per Kanwil per 31 Desember 2008	60
Tabel IV.C.2.2.7	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Kanwil per 31 Desember 2008	61
Tabel IV.C.2.2.8	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kanwil per 31 Desember 2008	62
Tabel IV.C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007	64
Tabel IV.C.2.3.4	Rincian Aset Tetap – Aset Tidak Berwujud per Kanwil per 31 Desember 2008	65
Tabel IV.C.2.3.5	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per Kantor Wilayah	66
Tabel IV.C.2.4.a	Posisi Utang per 31 Desember TA 2008	67
Tabel IV.C.2.4.b	Posisi Utang per 31 Desember TA 2008 dan 2007	68
Tabel IV.C.2.4.3.a	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember TA 2008	70
Tabel IV.C.2.4.3.b	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember TA 2008 dan 2007	70
Tabel IV.C.2.4.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember TA 2008 dan 2007	71
Tabel IV.C.2.5.1	Cadangan Piutang per 31 Desember TA 2008 dan 2007	72
Tabel IV.C.2.5.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember TA 2008 dan 2007	73
Tabel IV.D.3	Rekapitulasi Saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008	79

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik IV.B.2.1	Realisasi Pendapatan dan PNBP TA 2008 dan TA 2007	23
Grafik IV.B.2.1.2	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dan TA 2007	27
Grafik IV.B.2.1.3	Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2008	28
Grafik IV.B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah TA 2008 dan TA 2007	30
Grafik IV.B.2.2.1.a	Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA TA 2008 dan TA 2009	31
Grafik IV.B.2.2.1.b	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2008	32
Grafik IV.B.2.2.4	Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2008	35
Grafik IV.C.1	Komposisi Neraca per 31 Desember 2008	39
Grafik IV.C.2.1.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2008 dan 2007	41
Grafik IV.C.2.1.2	Perbandingan Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2008 dan 2007	42
Grafik IV.C.2.1.3	Komposisi per Jenis Piutang Pajak per 31 Desember 2008	45
Grafik IV.C.2.1.4	Komposisi per Jenis Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2008 dan 2007	46
Grafik IV.C.2.1.5	Komposisi Bagian Lancar TGR per 31 Desember TA 2008 dan 2007	47
Grafik IV.C.2.1.6	Komposisi Persediaan per 31 Desember 2008	48
Grafik IV.C.2.2	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2008	49
Grafik IV.C.2.2.1	Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember TA 2008 dan 2007	50
Grafik IV.C.2.3.2	Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	64
Grafik IV.C.2.4	Komposisi Jenis Utang Per 31 Desember 2008	68
Grafik IV.C.2.4.1	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	69
Grafik IV.C.2.4.2	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	69
Grafik IV.C.2.4.3	Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	70
Grafik IV.C.2.5	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	71
Grafik IV.C.2.5.1	Perbandingan Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	72
Grafik IV.C.2.5.3	Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember TA 2008 dan 2007	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Neraca Percobaan
Lampiran B	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Lampiran B.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Lampiran B.2	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
Lampiran B.3	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan
Lampiran C	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran C.1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran C.2	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
Lampiran C.3	Berita Acara Rekonsiliasi Belanja
Lampiran D	Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran D.1	Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran D.2	Daftar Rekening Yang Dipertahankan
Lampiran D.3	Daftar Rekening Yang Ditutup
Lampiran D.4	Daftar Rekening Tempat Pembayaran PBB
Lampiran E	Lampiran Piutang Pajak
Lampiran E.1	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Lampiran E.2	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per Kanwil
Lampiran E.3	Rincian Kondisi Piutang Pajak
Lampiran E.4	Daftar Aset Yang Disita Penagihan Tunggakan Pajak
Lampiran F	Rincian Piutang Bukan Pajak
Lampiran G	Realisasi Penyelesaian Kerugian Negara (Tuntutan Ganti Rugi)
Lampiran H	Rincian Persediaan
Lampiran I	Rincian Aset Tetap

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	:	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan

LAPORAN REALISASI APBN DAN NERACA

Pendapatan Negara dan Hibah

		Hal.
Catatan B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	22
Catatan B.2.1.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah	25
Catatan B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	26
Catatan B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
Catatan B.2.1.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	29
Catatan B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara	29

Belanja Negara

Catatan B.2.2	**Belanja Negara**	31
Catatan B.2.2.1	Belania	31
Catatan B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kanwil DJP	32
Catatan B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Fungsi	33
Catatan B.2.2.4	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	34
Catatan B.2.2.5	Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)	37
Catatan B.2.2.6	Belanja DJP Menurut Jenis Satuan Kerja	38
Catatan B.2.2.7	Pengembalian Belanja	38
Catatan B.3	Catatan Penting Lainnya	38 38

ASET

Catatan C.2.1	**Aset Lancar**	40
Catatan C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Catatan C.2.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	41
Catatan C.2.1.3	Piutang Pajak	42
Catatan C.2.1.4	Piutang Bukan Pajak	45
Catatan C.2.1.5	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	47
Catatan C.2.1.6	Persediaan	47
	Investasi Jangka Panjang	
Catatan C.2.2	**Aset Tetap**	49
Catatan C.2.2.1	Tanah	51
Catatan C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	52
Catatan C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	55
Catatan C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	57
Catatan C.2.2.5	Irigasi	58
Catatan C.2.2.6	Jaringan	60
Catatan C.2.2.7	Aset Tetap Lainnya	61
Catatan C.2.2.8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	62

Catatan	C.2.3	**Aset Lainnya**	63
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	63
Catatan	C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	64
Catatan	C.2.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	64
Catatan	C.2.3.4	Aset Tak Berwujud	64
Catatan	C.2.3.5	Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan	66

KEWAJIBAN

	C.2.4	**Kewajiban Jangka Pendek**	67
Catatan	C.2.4.1	Uang Muka dari KPPN	68
Catatan	C.2.4.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	69
Catatan	C.2.4.3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	69
Catatan	C.2.4.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	70

EKUITAS

	C.2.5	**Ekuitas Dana Lancar**	71
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Piutang	71
Catatan	C.2.5.2	Cadangan Persediaan	72
Catatan	C.2.5.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka	72
	C.2.6	**Ekuitas Dana Investasi**	73
Catatan	C.2.6.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	73
Catatan	C.2.6.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	74
	C.3	Catatan Penting Lainnya	74

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI T.A. 2007	75
D.2	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI T.A. 2008	75
D.3	Rekening Pemerintah	78

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 Mei 2009
a.n Direktur Jenderal
a. Sekretaris Direktorat Jenderal

DJONIFAR ABDUL FATAH
NIP 060045217

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 sebesar Rp571.015.136.834.249,00 atau sebesar 106,82% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp534.535.380.328.342,00 yang terdiri-dari terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp571.007.247.904.950,00 atau mencapai 106,82% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.888.929.299,00 atau mencapai 171,86% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya realisasi belanja Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2008 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.206.950.764.116,00 atau 71,19% anggarannya sebesar Rp4.504.740.255.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp906.289.163.569,00 menjadi sebesar Rp4.113.239.927.685,00 atau 91,31% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008		TA 2007	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	534.535.380.328.342	571.015.136.834.249	432.517.801.125.015	425.387.422.301.547
Belanja Rupiah Murni	4.504.740.255.000	4.113.239.927.685	4.772.721.741.000	3.815.607.559.089

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp56.411.609.187.631,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp45.263.026.930.750,00 Aset Tetap sebesar Rp11.053.404.592.040,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp95.177.664.841,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp313.267.702.980,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp56.098.341.484.651,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp44.949.759.227.770,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp11.148.582.256.881,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai Tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Neraca Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	**31-Des-08**	**31-Des-07**	**Nilai kenaikan/ (penurunan)**
Aset	56.411.609.187.631	38.954.886.445.933	17.456.722.741.698
Aset Lancar	45.263.026.930.750	31.971.676.820.046	13.291.350.110.704
Aset Tetap	11.053.404.592.040	6.982.474.213.719	4.070.930.378.321
Aset Lainnya	95.177.664.841	735.412.168	94.442.252.673
Kewajiban	313.267.702.980	1.612.873.685	311.654.829.295
Kewajiban Jangka Pendek	313.267.702.980	1.612.873.685	311.654.829.295
Ekuitas Dana	56.098.341.484.651	38.953.273.572.248	17.145.067.912.403
Ekuitas Dana Lancar	44.949.759.227.770	31.970.063.946.361	12.979.695.281.409
Ekuitas Dana Investasi	11.148.582.256.881	6.983.209.625.887	4.165.372.630.994

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap. : LRAWT
Tanggal : Tuesday, May 26,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauaet

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

No	URAIAN	2008				2007			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**								
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	534,535,380,328,342	571,015,136,834,249	36,479,756,505,907	106.82	432,517,801,125,015	425,387,422,301,546	(7,130,378,823,469)	98.35
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	534,530,790,000,000	571,007,247,904,950	36,476,457,904,950	106.82	432,516,250,000,000	425,378,947,424,559	(7,137,302,575,441)	98.35
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,590,328,342	7,888,929,299	3,298,600,957	171.86	1,551,125,015	8,474,876,987	6,923,751,972	546.37
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	534,535,380,328,342	571,015,136,834,249	36,479,756,505,907	106.82	432,517,801,125,015	425,387,422,301,546	(7,130,378,823,469)	98.35
B	**BELANJA**								
B.1	Rupiah Murni	4,504,740,255,000	4,113,239,927,685	(391,500,327,315)	91.31	4,772,721,741,000	3,815,607,559,089	(957,114,181,911)	79.95
	Belanja Pegawai	1,208,849,076,373	1,004,896,490,194	(203,952,586,179)	83.13	1,086,092,918,000	814,485,631,145	(271,607,286,855)	74.99
	Belanja Barang	1,536,482,984,127	947,301,977,025	(589,181,007,102)	61.65	1,364,481,873,000	759,326,665,635	(605,155,207,365)	55.65
	Belanja Modal	1,759,408,194,500	1,254,752,296,897	(504,655,897,603)	71.32	2,322,146,950,000	1,633,458,659,662	(688,688,290,338)	70.34
	Pembayaran Bunga Utang	0	906,289,163,569	906,289,163,569	0.00	0	608,336,602,647	608,336,602,647	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.2	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.3	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRAWT
Tanggal : Tuesday, May 26,
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauaet

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

No	URAIAN	2008				2007			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	4,504,740,255,000	4,113,239,927,685	(391,500,327,315)	91.31	4,772,721,741,000	3,815,607,559,089	(957,114,181,911)	79.95
C	**PEMBIAYAAN**								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 29 - Mei - 2009
a.n Direktur Jenderal
O. Sekretaris Direktorat Jenderal

Djonifar Abdul Fatah
NIP 060045217

III. NERACA

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2008	2007	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	944,963,095	1,612,873,685	(667,910,590)	(41.41)
Kas di Bendahara Penerimaan	1,822,735	0	1,822,735	0.00
Piutang Pajak	45,173,077,395,397	31,906,597,010,360	13,266,480,385,037	41.57
Piutang Bukan Pajak	684,051,351	230,556,200	453,495,151	196.69
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	118,258,820	67,821,200	50,437,620	74.36
Persediaan	88,200,439,352	63,168,558,601	25,031,880,751	39.62
JUMLAH ASET LANCAR	**45,263,026,930,750**	**31,971,676,820,046**	**13,291,350,110,704**	**41.57**
ASET TETAP				
Tanah	3,736,360,295,112	1,404,110,611,920	2,332,249,683,192	166.10
Peralatan dan Mesin	3,217,317,808,089	2,689,755,519,254	527,562,288,835	19.61
Gedung dan Bangunan	3,065,068,755,475	1,665,539,760,965	1,399,528,994,510	84.02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,231,579,490	22,934,570,343	1,297,009,147	5.65
Aset Tetap Lainnya	191,293,118,826	374,736,959,252	(183,443,840,426)	(48.95)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	819,133,035,048	825,396,791,985	(6,263,756,937)	(0.75)
JUMLAH ASET TETAP	**11,053,404,592,040**	**6,982,474,213,719**	**4,070,930,378,321**	**58.30**
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	689,565,763	647,216,968	42,348,795	6.54
Aset Tak Berwujud	83,231,383,947	0	83,231,383,947	0.00
Aset Lain-lain	11,256,715,131	88,195,200	11,168,519,931	12,663.41
JUMLAH ASET LAINNYA	**95,177,664,841**	**735,412,168**	**94,442,252,673**	**12,842.08**
JUMLAH ASET	**56,411,609,187,631**	**38,954,886,445,933**	**17,456,722,741,698**	**44.81**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	63,500,181,137	0	63,500,181,137	0.00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	248,820,736,013	0	248,820,736,013	0.00
Uang Muka dari KPPN	944,963,095	1,612,873,685	(667,910,590)	(41.41)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	1,822,735	0	1,822,735	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**313,267,702,980**	**1,612,873,685**	**311,654,829,295**	**19,322.95**
JUMLAH KEWAJIBAN	**313,267,702,980**	**1,612,873,685**	**311,654,829,295**	**19,322.95**
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	45,173,879,705,568	31,906,895,387,760	13,266,984,317,808	41.58
Cadangan Persediaan	88,200,439,352	63,168,558,601	25,031,880,751	39.62
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-312,320,917,150	0	(312,320,917,150)	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	**44,949,759,227,770**	**31,970,063,946,361**	**12,979,695,281,409**	**40.59**

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2008	2007	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11,053,404,592,040	6,982,474,213,719	4,070,930,378,321	58.30
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	95,177,664,841	735,412,168	94,442,252,673	12,842.08
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	**11,148,582,256,881**	**6,983,209,625,887**	**4,165,372,630,994**	**59.64**
JUMLAH EKUITAS DANA	**56,098,341,484,651**	**38,953,273,572,248**	**17,145,067,912,403**	**44.01**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**56,411,609,187,631**	**38,954,886,445,933**	**17,456,722,741,698**	**44.81**

Jakarta, 29 - Mei - 2009
a.n Direktur Jenderal
a . Sekretaris Direktorat Jenderal

Djonifar Abdul Fatah
NIP 060045217

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 09/PB/2009 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Sektor Pajak pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak.

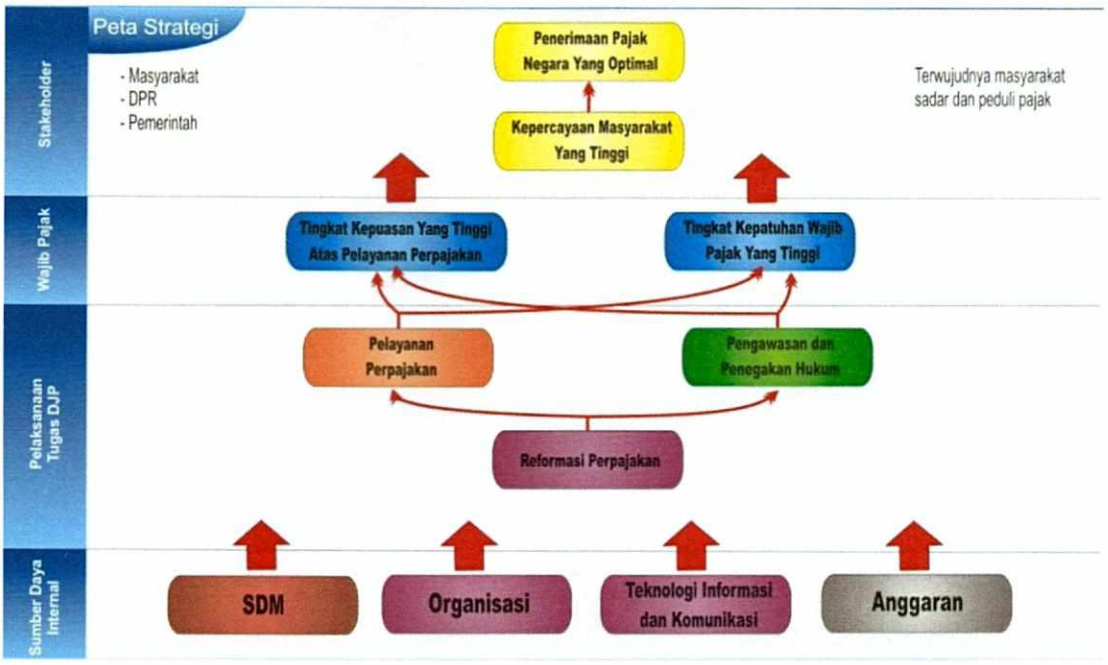
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 merupakan perwujudan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009, dengan memperhatikan harapan *stakeholders* serta kondisi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta stategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak yang optimal yang dapat terwujud melalui kepercayaan masyarakat yang tinggi. Adapun dua pilar utama yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Strategi yang ditempuh diawali dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk perbaikan proses bisnis dan kebijakan perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan strategi peningkatan pelayanan perpajakan dan strategi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang baik membutuhkan modal dan prasyarat sumber daya internal, yaitu Sumber Daya Manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta anggaran. Peta Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dan melaksanakan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata yang terarah dan terukur dalam mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah '**Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi**'.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi '**Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien**'.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Integritas – Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
2. Profesionalisme – Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
3. Inovasi – Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
4. *Teamwork* – Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkunganya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis,melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Pendapatan

PENDAPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Realisasi Pendapatan Brutto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp603.376.674.852.039,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp32.361.538.017.790,00 realisasi Pendapatan Neto sebesar Rp571.015.136.834.249,00 atau 106.83 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2008 sebesar Rp534.535.380.328.342,00. Dibandingkan dengan 31 Desember 2007, Pendapatan tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp.141.716.859.740.172,00

atau 30,69 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 141.717.448.762.341,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp589.022.169.

Belanja

BELANJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; dan (3) Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja TA 2008 dapat dilihat pada Tabel IV.A.1.a. dan IV.A.1.b. berikut:

Tabel IV.A.1.a.
Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2008
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.208.849.076.373	1.005.503.194.511	83,18
2.	Belanja Barang	1.536.482.984.127	947.456.692.831	61,66
3.	Belanja Modal	1.759.408.194.500	1.254.758.817.597	71,32
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**4.504.740.255.000**	**3.207.718.704.939**	71,21
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	906.317.519.935	0,00
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.504.740.255.000**	**4.114.036.224.874**	91,33

Tabel IV.A.1.b.
Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	2008	2007	% Naik (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.005.503.194.511	821.569.209.537	22,39
2.	Belanja Barang	947.456.692.831	759.417.831.369	24,76
3.	Belanja Modal	1.254.758.817.597	1.633.745.889.518	(23,20)
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**3.207.718.704.939**	**3.214.732.930.424**	(0,22)
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	906.317.519.935	608.336.602.647	48,98
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.114.036.224.874**	**3.823.069.533.071**	7,61

Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2008 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.207.718.704.939,00 atau 71,21 persen, dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp906.317.519.935,00 menjadi sebesar Rp4.114.036.224.874,00 atau 91,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam TA 2008 sebesar Rp4.504.740.255.000,00.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan TA 2007, dan dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, realiasasi belanja pegawai, barang dan modal tahun 2008 mengalami penurunan 0,22 persen dari belanja TA 2007, dan apabila dengan memperhitungkan pemberian

Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak realisasi belanja mengalami kenaikan 7,61 persen dari belanja tahun 2007.

Kenaikan ini berasal dari kenaikan Belanja Pegawai sebesar 22,39 persen, kenaikan Belanja Barang sebesar 24,76 persen dan Penurunan Belanja Modal sebesar 23,20 persen dan kenaikan pembayaran Bunga sebesar 48,98 persen.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data / laporan keuangan satuan kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp4.504.740.255.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.951.929.562.000
Satuan kerja daerah (KD)	Rp2.552.810.693.000

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 569 unit kantor. Dari jumlah tersebut unit kantor vertikal yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 544 unit kantor, sedangkan sejumlah 25 unit kantor tidak mengelola DIPA sehingga tidak menyampaikan Laporan Keuangan. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.1. berikut:

Tabel IV.A.3.1.
Rekapitulasi Jumlah Satuan kerja Menurut Wilayah

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	14
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	15
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Ii Di Pematang Siantar	21
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	26
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Jambi	25

060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	20
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	17
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Ii Di Bekasi	18
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	22
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	17
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Ii Di Sidoarjo	21
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii Di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	18
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	30
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	26
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	26
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	22
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	4
Jumlah		544

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 juga mengelola dana yang berasal dari BA 069 Belanja Lain-lain (Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp1.178.027.740.000,00. Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BA 069 Belanja Lain-Lain dibuat tersendiri.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 569 unit kantor. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dari 569 unit kantor vertikal yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 544 unit kantor, sedangkan sejumlah 25 unit kantor tidak wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Negara.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.2. berikut:

Tabel IV.A.3.2.
Rekapitulasi Jumlah Satuan kerja Menurut Wilayah

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	14
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	15
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Ii Di Pematang Siantar	21
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	26
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Jambi	25
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	20
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	17
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	17

090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Ii Di Bekasi	18
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	22
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	17
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Ii Di Sidoarjo	21
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii Di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	18
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	30
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	26
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	26
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	22
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	4
Jumlah		544

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar pembayaran pajak pada MPN dan *ePayPoint* yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember.
b. Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi.
c. Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
d. Penerimaan PBB dan BPHTB dibukukan berdasarkan Laporan Bulanan, Mingguan atau Harian Penerimaan PBB dan BPHT dari Bank Operasional III PBB.
e. Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah dan Penerimaan Pajak-Pajak lainnya yang diterima melalui rekening BUN dibukukan berdasarkan SSP dan data penerimaan pajak dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi.
f. Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan tata cara pembayaran pajak-pajak negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, rekonsiliasi data penerimaan pajak dilaksanakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN dan *ePayPoint* dengan data trasnsaksi penerimaan pajak dalam Laporan Arus Kas (LAK).

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan asset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan
Berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tahun pajak 2007 piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
   f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
   h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   i) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   j) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;

k) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
l) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya Piutang Pajak tersebut dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan. Khusus untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Dalam hal Piutang Pajak dalam bentuk valuta asing, Piutang Pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas,

maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 31 Desember 2008 berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan yang direkam kedalam SIMAK-BMN yang kemudian dikirim ke SAK adalah harga perolehan yang berasal dari Revaluasi (penilaian kembali) oleh Tim Penertiban Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. Aset tetap yang dinilai kembali adalah asset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2005 hingga tahun 2008 nilai perolehannya dinilai sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2009 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut sebagaimana Tabel IV.B.1.1. sampai dengan IV.B.1.3. berikut:

Tabel IV.B.1.1.
Pendapatan dan Belanja Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan Negara dan Hibah	%	Belanja Negara	%
Pagu Anggaran	534.535.380.328.342	100,00	4.504.740.255.000	100,00
Realisasi Bruto	603.376.674.852.038	112,88	4.114.036.224.874	91,33
Pengembalian	32.361.538.017.789	6,05	796.297.189	0,02
Realisasi Netto	571.015.136.834.248	106,82	4.113.239.927.685	91,31

Tabel IV.B.1.2.
Pendapatan dan Belanja Brutto Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**534.535.380.328.342**	**603.376.674.852.038**	112,88
Penerimaan Pajak	534.530.790.000.000	603.368.785.922.739	112,88
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.590.328.342	7.888.929.299	171,86
Realisasi Belanja Negara	**4.504.740.255.000**	**4.114.036.224.874**	91,33
Belanja Rupiah Murni	4.504.740.255.000	3.207.718.704.939	71,21
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	906.317.519.935	0,00
Belanja PNBP	0	0	0,00

Tabel IV.B.1.3.
Pendapatan dan Belanja Netto Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**534.535.380.328.342**	**571.015.136.834.248**	106,82
Penerimaan Pajak	534.530.790.000.000	571.007.247.904.949	106,82
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.590.328.342	7.888.929.299	171,86
Realisasi Belanja Negara	**4.504.740.255.000**	**4.113.239.927.685**	91,31
Belanja Rupiah Murni	4.504.740.255.000	3.206.950.764.116	71,19
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	906.289.163.569	0,00
Belanja PNBP	0	0	0,00

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp603.376.674.852.038,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp32.361.538.017.790,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp571.015.136.834.248,00 atau 106,82 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2008 sebesar Rp534.535.380.328.342,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahun Anggaran 2007, Pendapatan Bruto tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp.141.716.859.740.172,00 atau 30,70 persen.

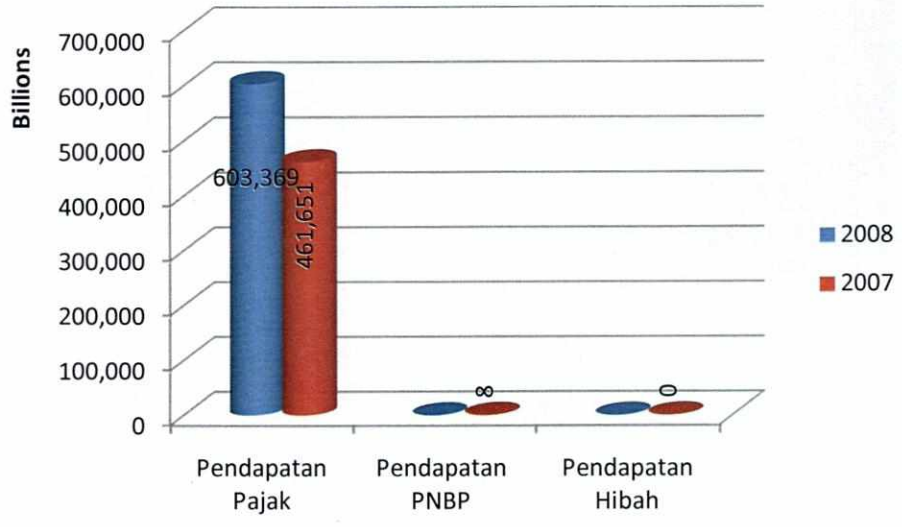
Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp141.717.448.762.341,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp589.022.169,00.

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP tahun anggaran 2007 dan 2008 sebagaimana Tabel IV.B.2.1 dan Grafik IV.B.2.1 berikut:

Tabel IV.B.2.1
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Tahun 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	2008	2007	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak	603.368.785.922.739	461.651.337.160.398	30,70
Pendapatan PNBP	7.888.929.299	8.477.951.468	(6,95)
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	603.376.674.852.038	461.659.815.111.866	30,70

Grafik IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Tahun 2008 dan 2007
(dalam milyar rupiah)



Rekonsiliasi Pendapatan

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku pengguna anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut rekonsiliasi dilaksnakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan uang (kas) yang masuk dan dibukukan di Bendahara Umum Negara;

	SAU	SAI	SELISIH
Penerimaan Pajak Bruto	603.472.292.300.968	603.368.785.922.740	103.506.378.228
Pengembalian Pendapatan	32.366.851.644.327	32.361.538.017.790	5.313.626.537
Penerimaan Pajak Neto	571.105.440.656.641	571.007.247.904.950	98.192.751.691

b. Membandingkan (mencocokan) data transaksi penerimaan pajak.

	COCOK	BELUM COCOK	JUMLAH
MPN (Termasuk PBB dan BPHTB)	466.636.892.008.758	1.023.076.221.270	467.659.968.230.028
ePayPoint	11.581.469.465.638	4.601.668.490	11.586.071.134.128
BUN	124.122.746.558.578	0	124.122.746.558.578
JUMLAH	602.341.108.032.974	1.027.677.889.760	603.368.785.922.734

Transaksi penerimaan pajak yang belum cocok (belum dapat dilakukan rekonsiliasi) sebesar Rp1.027.677.889.760,00 tersebut, merupakan penerimaan pajak dari transaksi yang belum dapat ditelusuri rincian kas masuknya di SAU (Kas Negara). Transaksi penerimaan pajak tersebut terdiri dari:

Keterangan	Transaksi	Rupiah
1. MPN	26.702	684.124.018.365
2. *ePayPoint*	488	4.601.668.490
3. Penerimaan PBB dan BPHTB melalui BO3 yang tidak masuk MPN	n.a	338.952.202.905
Jumlah	**27.190**	**1.027.677.889.760**

Jumlah tersebut setara dengan 0,17% dari total penerimaan pajak yang dibukukan sebesar Rp603.368.785.922.734,00.

Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam penerimaan pajak brutto sebesar Rp603.368.785.922.734,00 sebagaimana tersebut di atas, terdapat transaksi penerimaan pajak yang pajaknya ditanggung oleh Pemerintah sebesar Rp21.014.630.640.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pajak DTP	MAP (Jenis Pajak)			Total
	411126	411127	411211	
BBM			14.765.000.000.000	14.765.000.000.000
Minyak Goreng			3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Obligasi		800.000.000.000		800.000.000.000
Panas Bumi	500.000.000.000			500.000.000.000
PDRI			49.630.640.803	49.630.640.803
Tepung Terigu			1.900.000.000.000	1.900.000.000.000
Total	**500.000.000.000**	**800.000.000.000**	**19.714.630.640.803**	**21.014.630.640.803**

Sehubungan dengan transaksi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana tersebut di atas, terdapat transaksi PPN DTP sebesar Rp851.819.571.872,00 yang belum diakui sebagai pendapatan pajak. Transaksi tersebut merupakan realisasi PPN DTP yang melampaui pagu anggaran yang disediakan untuk penjualan minyak goreng sebesar Rp3.000.000.000.000

dan atas penjualan tepung terigu sebesar Rp1.900.000.000.000. Transaksi PPN DTP sebesar Rp851.819.571.872,00 tersebut terdiri dari PPN atas penjualan minyak goreng sebesar Rp161.990.942.961,00 dan PPN atas penjualan tepung terigu sebesar Rp689.828.628.911,00.

Pemindahbukuan dari Kompensasi Piutang Pajak

Sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan STDD Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap terjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan piutang pajak dalam tahun 2008 adalah sebesar Rp4.302.256.233.000,00 dan jumlah tersebut tidak masuk dalam penghitungan besarnya realisasi penerimaan pajak Rp603.368.785.922.734,00 sebagaimana tersebut di atas. Meskipun jumlah penerimaan pajak tersebut berpengaruh menambah jumlah relaisasi penerimaan pajak secara bruto, tetapi jumlah penerimaan pajak tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak netto.

B.2.1.1. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER KANTOR WILAYAH

Realisasi Pendapatan per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Brutto per Kantor Wilayah
(dalam rupiah)

KODE	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	REALISASI
000	Instansi Pusat	80,061,137,259,550
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	2,765,417,091,673
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	7,638,619,932,428
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Di Pematang Siantar	2,560,758,972,777
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	11,486,617,156,688
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Jambi	4,580,739,392,351
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	5,907,221,792,340
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	2,971,835,302,565
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	22,445,536,658,108
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	10,005,563,698,590
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	22,091,122,995,565
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	9,054,017,486,467
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	8,993,083,417,438

130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	78,966,422,680,329
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	9,155,870,443,443
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	9,545,405,900,711
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Ii Di Bekasi	15,644,655,521,375
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	6,579,199,118,714
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	3,376,746,972,438
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	1,524,951,914,985
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	8,877,136,774,331
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Di Sidoarjo	6,536,366,637,718
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Di Malang	5,043,153,953,547
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	1,993,062,843,329
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	4,409,497,671,081
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	9,465,518,912,895
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	4,685,988,357,919
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	2,916,737,652,393
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	2,809,106,794,224
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	1,962,294,413,073
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	5,748,773,095,794
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	233,574,114,029,262
	Jumlah	603,376,674,852,039

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi realisasi Pendapatan dirinci dalam tabel IV.B.2.1.2.a. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.a.
Realisasi Pendapatan TA 2008
(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Dalam Negeri	534.535.380.328.342	603.376.674.852.039	112,88
2	Hibah	0	0	0,00
TOTAL		534.535.380.328.342	**603.376.674.852.039**	112,88

Sedangkan Komposisi realisasi Penerimaan Dalam Negeri TA 2008 dapat dilihat pada Tabel Tabel IV.B.2.1.2.b. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.b.
Realisasi Pendapatan Dalam Negeri TA 2008
(dalam rupiah)

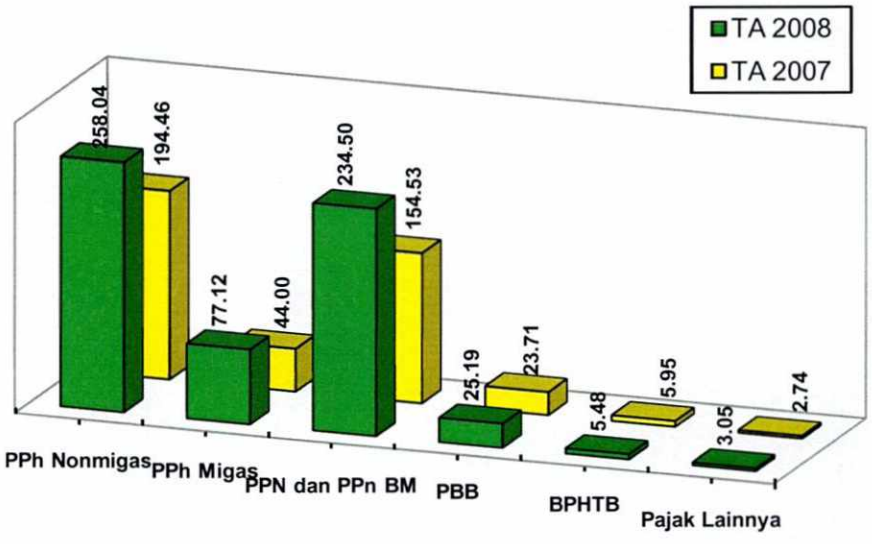
No	Jenis Penerimaan	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Pajak	534.530.790.000.000	603.368.785.922.739	112,88
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.590.328.342	7.888.929.299	171,86
TOTAL		**534.535.380.328.342**	**603.376.674.852.039**	112,88

Perbandingan realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.c berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.c.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Brutto TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-08	31-Des-07	% Naik/ (Turun)
PPh Nonmigas	258.044.703.433.389	202.045.513.523.014	27,72
PPh Migas	77.116.355.457.688	48.393.397.310.702	59,35
PPN dan PPn BM	234.496.062.869.753	178.803.607.628.121	31,15
PBB	25.187.911.614.788	23.717.202.575.488	6,20
BPHTB	5.475.437.607.281	5.951.861.959.942	(8,00)
Pajak Lainnya	3.048.314.939.840	2.739.754.163.131	11,26
Total	**603.368.785.922.739**	**461.651.337.160.398**	30,70

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dan 2007
(dalam trilliun rupiah)



B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

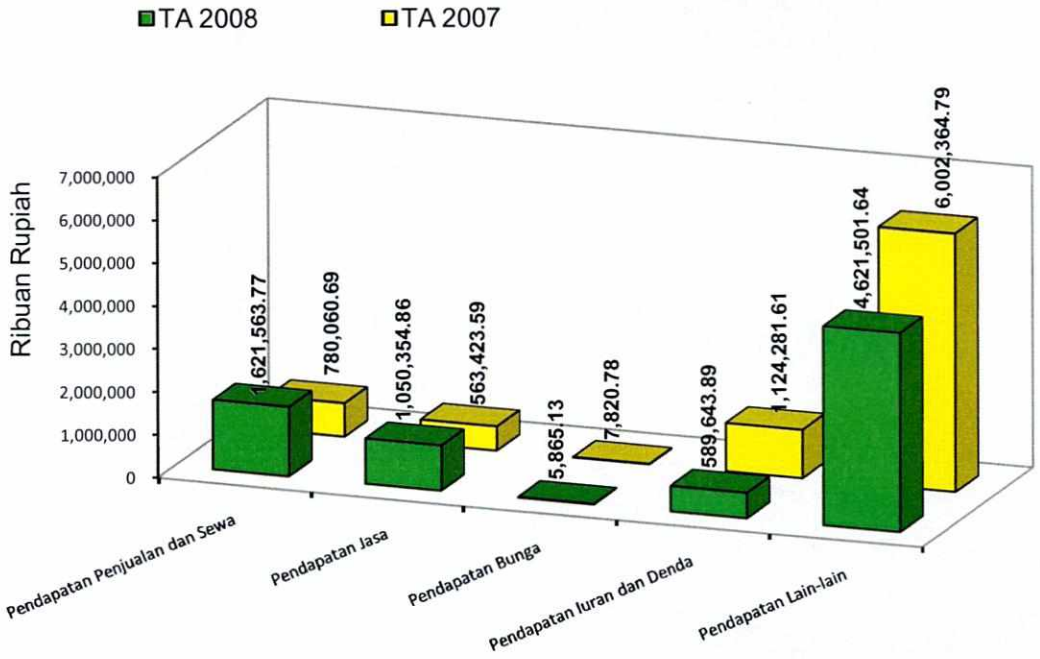
Realisasi PNBP

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2008 adalah sebesar Rp7.888.929.299,00 atau 171,86 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.590.328.342,00. Hal ini berarti PNBP TA 2008 mengalami penurunan sebesar Rp589.022.169,00 atau 6.95 persen dari realisasi TA 2007. Besarnya realisasi PNBP TA 2008 dan TA 2007 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. berikut:

Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Bukan Pajak Brutto TA 2008 dan TA 2007
(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan	2008	2007	% Naik (Turun)
PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa	1.621.563.774	780.060.693	107,88%
PNBP Pendapatan Jasa	1.050.354.862	563.423.588	86,42%
PNBP Pendapatan Bunga	5.865.129	7.820.781	-25,01%
PNBP Pendapatan Iuran dan Denda	589.643.893	1.124.281.612	-47,55%
PNBP Pendapatan Lain-lain	4.621.501.641	6.002.364.794	-23,01%
Total PNBP	**7.888.929.299**	**8.477.951.468**	-6,95%

Grafik IV.B.2.1.3.
Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2008 dan 2007
(dalam ribuan rupiah)



Realisasi PNBP Lainnya

B.2.1.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2008 dan 2007, Direktorat Jenderal Pajak tidak membukukan realisasi PNBP Lainnya.

B.2.1.5. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp32.361.538.017.790,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2007 mengalami penurunan sebesar Rp 3.910.854.792.529,00 atau sebesar 10,78 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan,karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring)*, maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

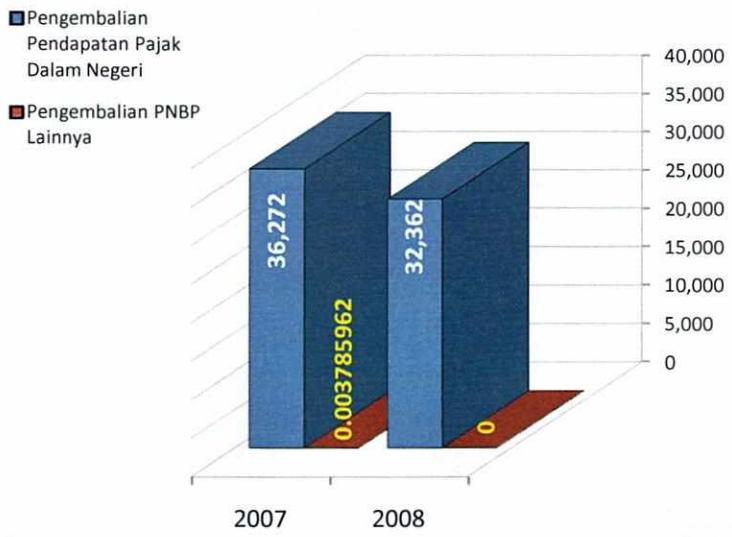
Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D).

Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNBP lainnya. Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.5. berikut:

Tabel IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
T.A 2008 dan T.A 2007
(dalam rupiah)

Jenis Pengembalian	T. A 2008	T. A 2007
Pendapatan Pajak dalam Negeri	**32.361.538.017.790**	**36.272.389.735.838**
PPh Migas	282.320.514	4.392.038.961.939
PPh Non Migas	8.087.990.449.533	7.173.237.798.562
PPh Fiskal Luar Negeri	755.239.711	416.965.381.752
PPN	23.966.079.631.284	24.087.138.906.122
PPnBM	277.138.446.870	191.259.718.065
PBB	3.590.270.585	5.133.274.818
BPHTB	10.594.642.483	4.567.297.718
Pajak Lainnya	9.300.000	1.890.000
Bunga Penagihan Pajak	15.097.716.810	2.046.506.862
Pengembalian PNBP Lainnya	**0**	**3.074.481**
Pendapatan Sewa	0	711.481
Pendapatan Jasa II	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	2.363.000
Total Pengembalian	**32.361.538.017.790**	**36.272.392.810.319**

Grafik IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
T.A 2008 dan T.A 2007
(dalam milyar rupiah)



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak telah dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak antara Dirktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan berupa daftar SP2D pengembalian pajak antara data SAU dengan data SAI. Secara garis besar hasil rekonsiliasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1.	Pengembalian Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (SAU)	Rp 32.366.851.644.327
2.	Pengembalian Menurut Direktorat Jenderal Pajak (SAI)	Rp 32.361.538.017.790
	Selisih	**Rp 5.313.626.537**

Selisih sebesar Rp5.313.626.537,00 merupakan SP2D dan koreksi pendapatan yang dilakukan berdasarkan dokumen (produk hukum) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Transaksi pengembalian pendapatan dan koreksi pendapatan tersebut terdiri-dari:

1.	SP2D atas SPM-PP (Koreksi Pendapatan)	Rp	5.186.844.797
2.	SP2D atas SPMKP Batal (Disetor Kembali)	Rp	112.877.763
3.	Koreksi Pendapatan PPh Pasal 25/29 (Valas)	Rp	17.381.878
4.	SP2D Belum Direkam (SAU Kurang Rekam)	Rp	(3.477.901)
	Jumlah	Rp	5.313.626.537

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara

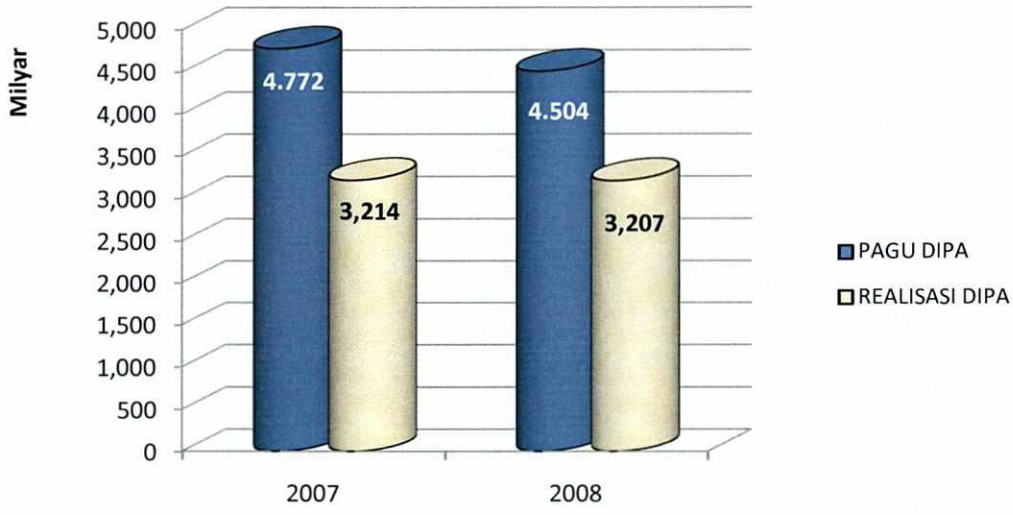
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga utang. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan Unit Kantor Wilayah, fungsi, jenis belanja dan jenis Satuan kerja.

B.2.2.1. Belanja

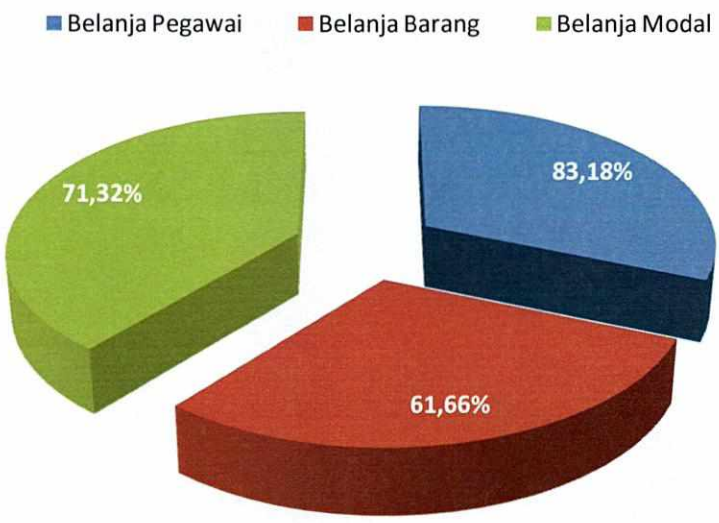
Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2008 tanpa memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp3.207.718.704.939,00 atau 71,21 Persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp4.504.740.255.000,00. Realisasi belanja TA 2008 mengalami penurunan sebesar Rp7.014.225.485,00 atau 0,22 Persen dari realisasi belanja pada TA 2007 sebesar Rp3.214.732.930.424,00 Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya pengeluaran untuk belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja dengan pagu DIPA tahun anggaran 2008 dan 2007 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.a dan IV.B.2.2.1.b berikut:

Grafik IV.B.2.2.1.a
Perbandingan Realisasi Belanja Brutto dengan Pagu DIPA
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam milyar rupiah)



Grafik IV.B.2.2.1.b
Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak menurut Jenis Belanja TA 2008



Rekonsiliasi Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data belanja antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

1.	Realisasi Belanja Menurut SAU	Rp	4.114.036.224.868
2.	Realisasi Belanja Menurut SAI	Rp	4.114.036.224.874
	Selisih	**Rp**	**(6)**

Selisih sebesar Rp6,00 tersebut merupakan selisih akibat adanya pembulatan angka.

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi Belanja per Kantor Wilayah

Realisasi Belanja Brutto Direktorat Jenderal Pajak TA 2008 tanpa Imbalan Bunga adalah sebesar Rp3.207.718.704.939,00, sedangkan Realisasi Belanja Brutto termasuk Imbalan Bunga adalah Rp.4.114.036.224.874,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Kantor Wilayah sebagaimana Table IV.B.2.2.2. berikut:

Tabel IV.B.2.2.2.
Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Kantor Pusat DJP	1.951.929.562.000	1,267,767,049,264	64.95
2	Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam	40.378.127.000	29,801,282,223	73.80
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	93.143.244.000	69,072,981,861	74.15
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	104.643.557.000	61,592,433,365	58.85

5	Kanwil DJP Riau Dan Kep. Riau	80.519.527.000	62,904,805,518	78.12
6	Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	74.494.258.000	57,395,947,579	77.05
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung	94.569.768.000	90,496,807,272	95.69
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	69.276.621.000	57,704,701,754	83.29
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	117.494.755.000	118,693,157,525	101.02
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	77.896.692.000	67,637,307,347	86.82
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	81.356.047.000	192,575,037,643	236.66
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	63.955.670.000	72,054,457,080	112.29
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	51.558.814.000	59,677,617,503	115.75
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	65.254.422.000	210,157,509,114	316.94
15	Kanwil DJP Banten	100.050.138.000	92,367,236,901	92.32
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	126.381.765.000	111,555,447,839	88.27
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	133.755.100.000	122,720,627,804	91.75
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	96.493.691.000	77,902,775,460	80.73
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.964.269.000	82,532,157,495	85.11
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	37.227.349.000	28,546,572,363	76.68
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	69.740.184.000	70,025,997,302	100.41
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	104.419.329.000	84,372,766,677	80.80
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	103.371.179.000	87,840,885,087	84.98
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	43.933.061.000	34,569,529,156	78.69
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	85.700.521.000	65,582,065,367	76.52
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	70.576.335.000	50,412,413,326	71.42
27	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat Dan Tenggara	104.462.866.000	68,392,715,075	65.47
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo Dan Maluku Utara	99.951.452.000	77,342,816,749	77.38
29	Kanwil DJP Bali	53.410.012.000	45,239,811,395	84.70
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	92.512.328.000	63,273,174,797	68.39
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	101.179.331.000	80,253,206,195	79.32
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	18.140.281.000	453,574,930,838	2500.37
	TOTAL	**4.504.740.255.000**	**4,114,036,224,874**	91.33

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi

Realisasi belanja menurut fungsi

Berdasarkan fungsi sebagaimana DIPA yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak menurut Fungsi TA 2008 adalah sebagaimana Table IV.B.2.2.3.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Brutto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2008
01	Pelayanan Umum	4.114.036.224.874
02	Pertahanan	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0
04	Ekonomi	0
05	Lingkungan Hidup	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0
07	Kesehatan	0
08	Pariwisata dan Budaya	0
09	Agama	0
10	Pendidikan	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0
Total		**4.114.036.224.874**

Sedangkan perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dapat ditunjukan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.b.
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2007
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2008	TA 2007
01	Pelayanan Umum	4.114.036.224.874	3.823.069.533.071
02	Pertahanan	**0**	**0**
03	Ketertiban dan Keamanan	0	0
04	Ekonomi	0	0
05	Lingkungan Hidup	0	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0	0
07	Kesehatan	0	0
08	Pariwisata dan Budaya	0	0
09	Agama	0	0
10	Pendidikan	0	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0	0
	Total	**4.114.036.224.874**	**3.823.069.533.071**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak TA 2008 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp4,114,036,224,874,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,61 persen dari tahun sebelumnya.

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja jenis belanja

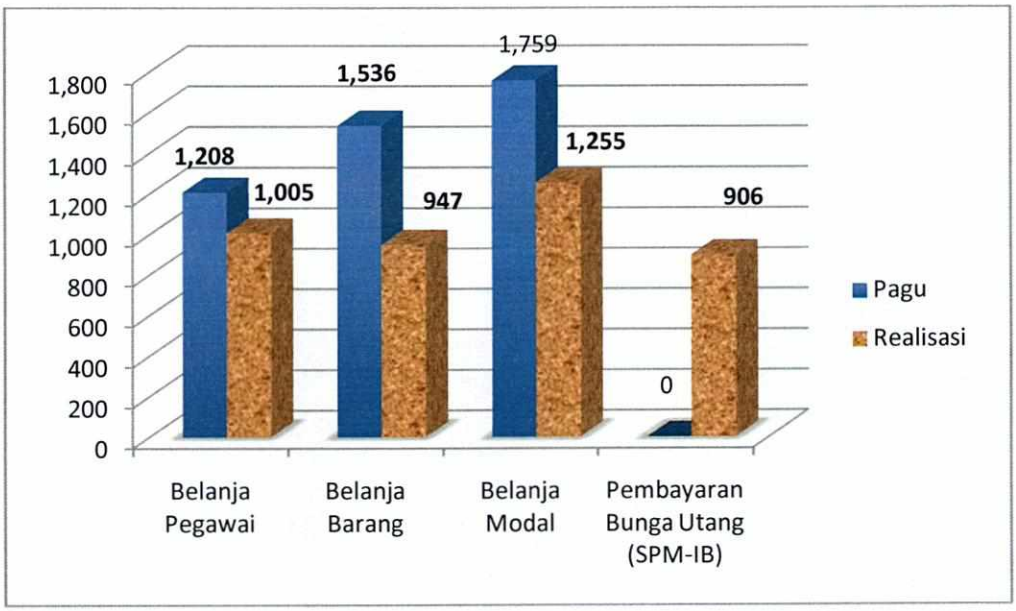
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.4. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Brutto Menurut Jenis Belanja TA. 2008
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Belanja Pegawai	1.208.849.076.373	1.005.503.194.511	83.18
2.	Belanja Barang	1.536.482.984.127	947.456.692.831	61.66
3.	Belanja Modal	1.759.408.194.500	1.254.758.817.597	71.32
4.	**Jumlah (1 + 2 + 3)**	**4.504.740.255.000**	**3.207.718.704.939**	**71.21**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	906.317.519.935	0
6.	**Jumlah (4 + 5)**	**4.504.740.255.000**	**4.114.036.224.874**	**91,33**

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk tahun anggaran 2008 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.4. berikut:

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2008
(dalam milyar rupiah)



Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2008 adalah sebesar Rp1.005.503.194.511,00 yang berarti 83,18 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp1.208.849.076.373,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp183.933.984.974,00 atau 22,39 persen dari TA 2007. Rincian Belanja Pegawai TA 2008 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.a
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-08	31-Des-07	% Naik / (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	978.044.563.311	784.638.146.534	24.65%
Belanja Honorarium	19.934.445.000	33.914.700.981	(41.22%)
Belanja Lembur	7.524.186.200	2.984.663.272	152.09%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0%
Belanja Tunjangan Khusus	0	0	0%
Belanja Vakasi	0	31.698.750	(100.00%)
Total	**1.005.503.194.511**	**821.569.209.537**	22.39%

Belanja Barang

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2008 adalah sebesar Rp947.456.692.831,00 yang berarti 61.66 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp1.536.482.984.127,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp188.038.861.462,00 atau 24.76 persen dari TA 2007. Rincian Belanja Barang TA 2008 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.b. dan Tabel IV.B.2.2.4.c. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.b
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	798.783.315.190	507.688.690.208	63.56%
Belanja Barang Non Operasional	47.244.393.000	41.376.646.465	87.58%
Belanja Jasa	243.084.148.857	134.446.626.515	55.31%
Belanja Pemeliharaan	257.508.490.610	139.869.619.830	54.32%
Belanja Perjalanan	189.862.636.470	124.075.109.813	65.35%
Jumlah	**1.536.482.984.127**	**947.456.692.831**	61.66%

Tabel IV.B.2.2.4.c
Realisasi Belanja BarangTahun 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	2008	2007	%
Belanja Barang Operasional	507.688.690.208	384.817.323.032	31.93
Belanja Barang Non Operasional	41.376.646.465	0	
Belanja Jasa	134.446.626.515	90.255.858.732	48.96
Belanja Pemeliharaan	139.869.619.830	167.646.324.730	(16.57)
Belanja Perjalanan	124.075.109.813	116.698.324.875	6.32
Jumlah	**947.456.692.831**	**759.417.831.369**	24.76

Belanja Modal

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2008 adalah sebesar Rp1.254.758.817.597,00 yang berarti 71.32 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp 1.759.408.194.500,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2008 mengalami penurunan sebesar Rp378,987,071,921,00 atau 23.20 Persen dari TA 2007. Rincian Belanja Modal TA 2008 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.d. dan Tabel IV.B.2.2.4.e. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.d
Realisasi Belanja Modal Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	7.981.800.000	5.542.681.800	69,44%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	889.950.474.000	618.501.968.728	69,50%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	714.513.056.500	533.220.314.992	74,63%
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	31.874.955.000	23.587.558.004	74,00%
Belanja Modal Fisik Lainnya	115.087.909.000	73.906.294.073	64,22%
Jumlah	**1.759.408.194.500**	**1.254.758.817.597**	**71,32%**

Tabel IV.B.2.2.4.e
Realisasi Belanja Modal Tahun 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008	31 Desember 2007	% Naik/ (Turun)
Belanja Modal Tanah	5.542.681.800	35.915.045.600	(84.57)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.501.968.728	53.691.536.936	1051.95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.220.314.992	501.768.617.418	6.27
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	23.587.558.004	1.042.194.399.564	(97.74)
Belanja Modal Fisik Lainnya	73.906.294.073	176.290.000	41823.13
Jumlah	**1.254.758.817.597**	**1.633.745.889.518**	(23.20)

B.2.2.5. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga TA 2008 adalah sebesar Rp906.317.519.935,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp297.980.917.288,00 atau 48.98 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk TA 2007. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Pembayaran Bunga Utang	Tahun Anggaran 2008	Tahun Anggaran 2007
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	906.317.519.935	608.336.602.647
Total	**906.317.519.935**	**608.336.602.647**

B.2.2.6. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari *(i)* Satker Pusat dan *(ii)* Satker Daerah. Dilihat dari komposisinya, realisasi Satker Daerah TA 2008 menempati porsi terbesar, yaitu Rp2.846.269.175.610,00 atau 69.18 persen dari total Belanja Direktorat Jenderal Pajak. Komposisi realisasi Belanja per jenis satuan kerja pada TA 2008 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Per Jenis Satuan Kerja Tahun 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Satuan Kerja Pusat	1.951.929.562.000	1,267,767,049,264	64.95%
Satuan Kerja Daerah	2.552.810.693.000	2.846.269.175.610	111,50%
Jumlah	**4,504,740,255,000**	**4.114.036.224.874**	91,33%

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp796.297.189,00 atau turun sebesar 89,33% dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.461.973.982,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	2008	2007	% Naik / (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	606.704.317	7.083.578.392	(91,44)
Pengembalian Belanja Barang	154.715.806	91.165.734	69,71
Pengembalian Belanja Modal	6.520.700	287.229.856	(97,73)
Pengembalian Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	28.356.366	0	0,00
TOTAL	**796.297.189**	**7.461.973.982**	(89,33)

Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Dalan rangka mengantisipasi kenaikan beban subsidi akibat kenaikan harga BBM, pemerintah dalam tahun 2008 melaksanakan kebijakan penghematan anggaran. Kebijakan dilaksanakan dengan melakukan efisiensi anggaran sebesar 10% dari total pagu anggaran yang diterima oleh masing-masing kementerian/lembaga. Akibat dari kebijakan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2009.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2008 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut :

Tabel IV.C.1
Neraca Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

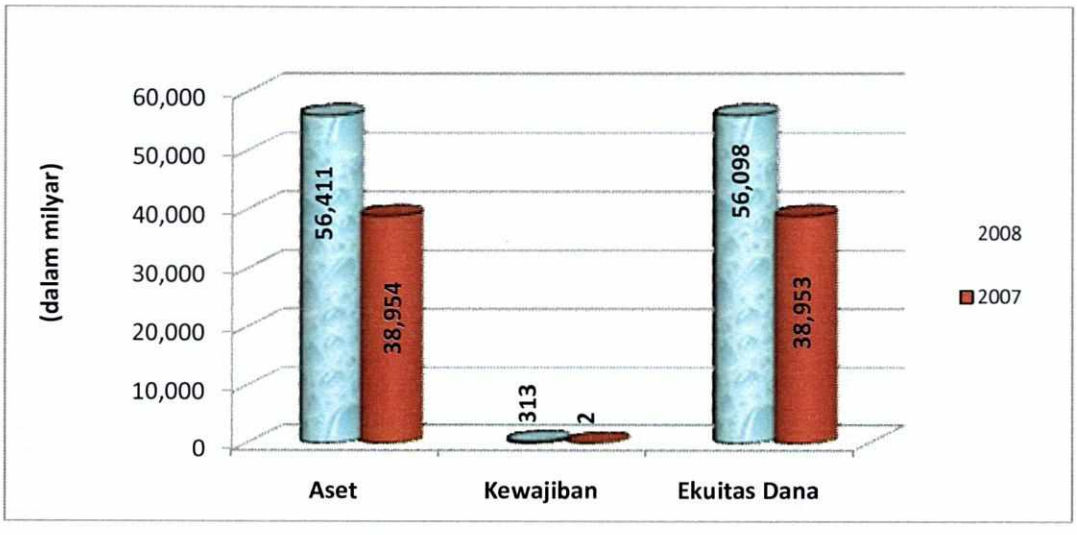
Uraian	31 Desember 2008	31 Desember 2007	Kenaikan / (penurunan)
Aset	56.411.609.187.631	38.954.886.445.933	17.456.722.741.698
Kewajiban	313.267.702.980	1.612.873.685	311.654.829.295
Ekuitas Dana	56.098.341.484.651	38.953.273.572.248	17.145.067.912.403

Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp56.411.609.187.631,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp45.263.026.930.750,00, Aset Tetap sebesar Rp11.053.404.592.040,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp95.177.664.841,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp313.267.702.980,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp313.267.702.980,00. Sedangkan jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp56.098.341.484.651,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp44.949.759.227.770,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp11.148.582.256.881,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2008 per 31 Desember 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp17.456.722.741.698,00 dari jumlah aset per 31 Desember 2007 sebesarRp38.954.886.445.933,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp311.654.829.295,00 dan kenaikan Ekuitas Dana sebesar Rp17.145.067.912.403,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca Per 31 Desember 2008
(dalam milyar rupiah)



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

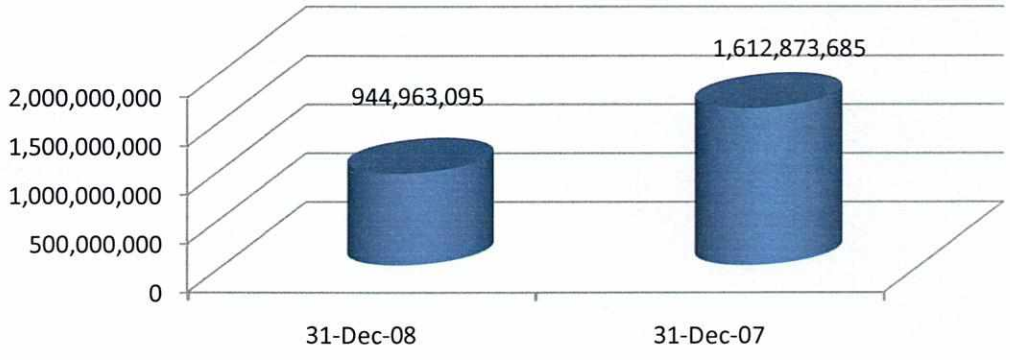
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp944.963.095,00. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.1. berikut:

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas Di Bendahara Pengeluaran TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Wilayah	12/31/08	12/31/07	Naik / (Turun)
0	Instansi Pusat	0	25.787.868	(25.787.868)
10	Kantor Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	384.614	24.550.328	(24.165.714)
20	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I di Medan	56.664.985	70.748.282	(14.083.297)
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II di Pematang Siantar	61.381.338	70.903.343	(9.522.005)
40	Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	91.560.997	8.833	91.552.164
50	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi di Padang	10.394.068	32.510.696	(22.116.628)
60	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	42.896.447	428.261	42.468.186
70	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung di Bandar Lampung	7.182.391	6.149.237	1.033.154
80	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat di Jakarta	0	52.681.461	(52.681.461)
90	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat di Jakarta	2.062.790	27.127.634	(25.064.844)
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan di Jakarta	0	27.517.279	(27.517.279)
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur di Jakarta	98.652	39.962.125	(39.863.473)
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara di Jakarta	1.800.000	30.367.156	(28.567.156)
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus di Jakarta	8.412.744	0	8.412.744
140	Kantor Wilayah DJP Banten di Serang	494.023	84.101.499	(83.607.476)
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung	4.148.910	23.900.645	(19.751.735)
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II di Bekasi	53.281.366	224.037.262	(170.755.896)
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I di Semarang	2.250.000	65.770.930	(63.520.930)
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II di Surakarata	38.903.415	40.050.737	(1.147.322)
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	0	0	0
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I di Surabaya	14.844.800	0	14.844.800
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II di Sidoarjo	34.988.927	18.883.449	16.105.478
220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang	144.784.827	59.067.302	85.717.525

230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat di Pontianak	0	29.371.997	(29.371.997)
240	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	74.871.788	14.479.144	60.392.644
250	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur di Balikpapan	63.820.988	117.261.436	(53.440.448)
260	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara di Makassar	66.001.209	85.908.535	(19.907.326)
270	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara di Manado	9.958.013	83.827.287	(73.869.274)
280	Kantor Wilayah DJP Bali di Denpasar	0	13.187.884	(13.187.884)
290	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara di Mataram	143.696.137	151.490.628	(7.794.491)
300	Kantor Wilayah DJP Papua Dan Maluku di Jayapura	10.079.666	192.792.992	(182.713.326)
310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar di Jakarta	0	(545)	545
	Jumlah	**944.963.095**	**1.612.873.685**	(667.910.590)

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)



Dalam rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana daftar terlampir, terdapat saldo sebesar Rp944.963.095,00 termasuk saldo dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Termasuk dalam jumlah tersebut antara lain gaji bulan Desember yang belum dibayarkan dan uang SPPD LS yang belum dibayarkan kepada pegawai.

C.2.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

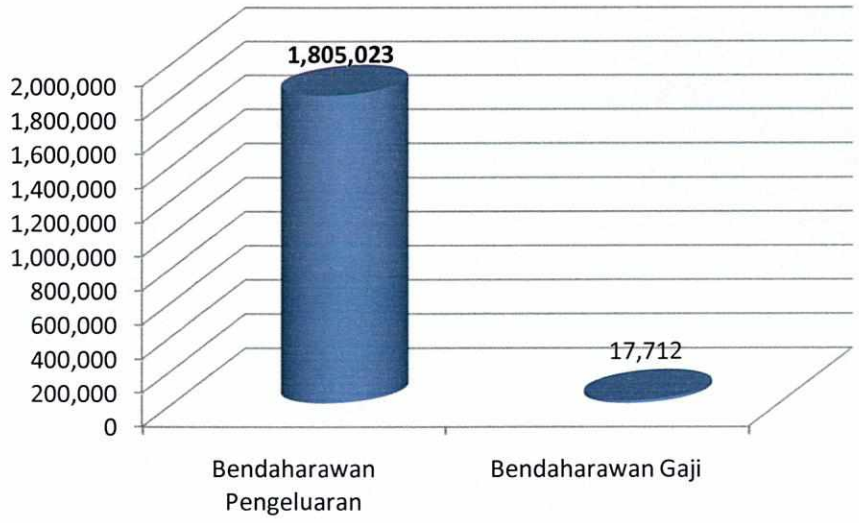
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.822.735,00. Sedangkan jumlah per 31 Desember 2007 Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar jumlah tersebut. Besarnya saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 Rp1.822.735,00 yang merupakan pendapatan dari jasa giro yang belum di setor pada akhir periode akuntansi. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdiri dari:

1.	Jasa Giro dari Rekening Bendahara Pengeluaran	Rp	1.805.023,00
2.	Jasa Giro dari Rekening Bendahara Gaji	Rp	17.712,00
	Jumlah	**Rp**	**1.822.735,00**

Tabel IV.C.2.1.2.
Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Akun	31-Des-08	31-Des-07	Naik / (Turun)
Kas Di Bendahara Penerimaan	1.822.735	0	1.822.735

Grafik IV.C.2.1.2.
Kas Di Bendahara Penerimaan 31 Desember TA 2008
(dalam rupiah)



Piutang Pajak

C.2.1.3. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp45.173.077.395.397,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2008 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan Kantor Wilayah, berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.3.a., Tabel IV.C.2.1.3.b., dan Tabel IV.C.2.1.3.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.3.a
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

KODE	NAMA KANWIL	JUMLAH
010	KANWIL DJP NAD	352,632,899,603
020	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	1,212,992,915,000
030	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	187,323,644,642
040	KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	1,246,678,493,046
050	KANWIL DJP SUMBAR DAN JAMBI	375,418,041,532
060	KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP BABEL	530,387,601,496
070	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	381,958,985,983
080	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	4,100,999,150,986
090	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	1,283,058,904,538
100	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	4,713,024,312,724
110	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	1,040,184,680,000
120	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	1,212,886,482,240
130	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	6,347,458,291,577
140	KANWIL DJP BANTEN	829,006,330,969
150	KANWIL DJP JAWA BARAT I	1,378,960,417,124
160	KANWIL DJP JAWA BARAT II	1,214,355,173,087
170	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	730,901,085,170
180	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	626,109,248,453
190	KANWIL DJP DIY	187,559,573,435
200	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	972,349,713,000
210	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	395,762,819,800
220	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	504,749,688,113
230	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	215,327,828,000
240	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	505,475,677,480
250	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	1,145,211,236,203
260	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN BARAT & TENGGARA	608,627,523,000
270	KANWIL DJP SULAWESI UTARA,TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	306,004,322,000
280	KANWIL DJP BALI	489,178,683,854
290	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	163,179,168,343
300	KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	518,030,263,000
310	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	11,397,284,241,000
TOTAL		45,173,077,395,397

Tabel IV.C.2.1.3.b
Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
(dalam rupiah)

JENIS PIUTANG	13/12/2008	31/12/2007	Naik / (Turun)
PIUTANG PPH PASAL 21	1.229.968.846.712	1.020.414.690.864	209.554.155.848
PIUTANG PPH PASAL 22	104.120.004.440	66.827.848.091	37.292.156.349
PIUTANG PPH PASAL 23	3.054.716.319.783	2.389.628.147.076	665.088.172.707
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1.006.960.630.021	930.137.420.350	76.823.209.671
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	16.268.284.571.207	8.885.377.594.100	7.382.906.977.107
PIUTANG PPH PASAL 26	125.143.589.474	0	125.143.589.474
PIUTANG PPH FINAL	922.916.307.676	0	922.916.307.676
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	95.145.000	879.508.183.935	(879.413.038.935)
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	12.560.346.602.995	11.042.004.050.239	1.518.342.552.756
PIUTANG PPN IMPOR	0	0	0
PIUTANG PPNBM DALAM NEGERI	280.039.959.243	99.268.206.548	180.771.752.695
PIUTANG PBB PEDESAAN	746.285.302.993	606.882.233.000	139.403.069.993
PIUTANG PBB PERKOTAAN	4.527.189.629.491	2.929.676.818.000	1.597.512.811.491
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	212.754.667.994	178.163.623.000	34.591.044.994
PIUTANG PBB KEHUTANAN	477.992.946.905	478.052.255.000	(59.308.095)
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	64.058.196.664	45.810.576.000	18.247.620.664
PIUTANG BPHTB	803.339.377.782	219.093.220.000	584.246.157.782
PIUTANG PTLL	815.162.918	0	815.162.918
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	2.788.050.134.100	2.089.472.783.166	698.577.350.934
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPN	0	46.252.964.479	(46.252.964.479)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPNBM	0	26.396.512	(26.396.512)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PTLL	0	0	0
TOTAL*)	45.173.077.395.397	31.906.597.010.360	13.266.480.385.037

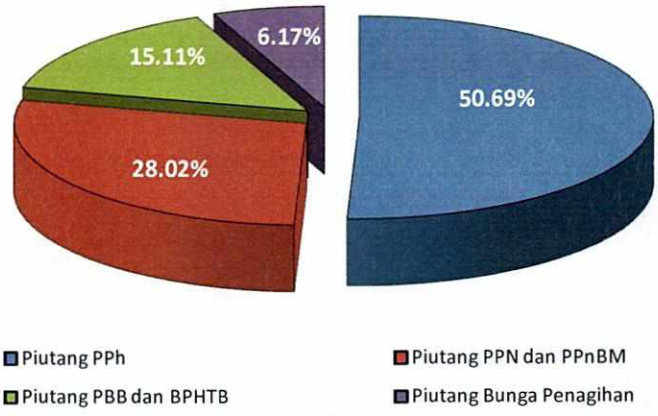
*) Dalam tahun 2008 terjadi koreksi daldo awal sebesar Rp281.615.715.569 ,00 sehingga saldo awal tahun 2008 menjadi Rp32.188.212.725.929 ,00.

Tabel IV.C.2.1.3.c
Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah	
Kurang dari 1 Tahun	Rp	12.239.111.738.000
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	Rp	9.776.181.927.000
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	Rp	10.213.857.380.000
5 Tahun atau Lebih	Rp	12.943.926.315.000
Jumlah*)	Rp	45.173.077.360.000

*) Terdapat selisih antara rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang pajak dengan rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebesar Rp35.397,00.

Grafik IV.C.2.1.3.
Komposisi per Jenis Piutang Pajak Per 31 Desember 2008
(dalam prosentase)



Penghapusan Piutang Pajak

Nilai piutang pajak seberar Rp45.173.077.395.397,00 tersebut, terdapat piutang sebesar Rp1.593.406.813.958,00 telah daluwarsa penagihannya. Dari piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp1.593.406.813.958,00 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp538.684.964.810,00 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar Rp76.319.053.833,00. Dalam tahun 2008 telah dihapusbukukan piutang pajak sebesar Rp75.987.721.765,00.

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah Rp16.091.195.868.298,00.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga benda Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan dengan estimasi harga pasar Rp1.555.664.410.561,00 dari piutang pajak sebesar Rp1.467.480.387.702,00.

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

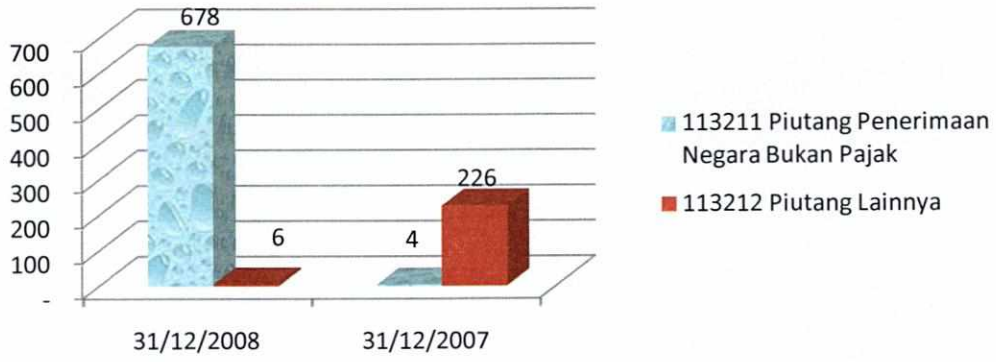
Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2007 sebesar Rp 230.556.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 453.495.151,00 di tahun 2008 sehingga Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp684.051.351,00. Piutang penerimaan negara bukan pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel IV.C.2.1.4.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-08	31-Des-07	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	678.439.351	4.449.200	673.990.151	15148,57%
Piutang Lainnya	5.612.000	226.107.000	(220.495.000)	-97,52%
Jumlah	**684.051.351**	**230.556.200**	**453.495.151**	**196,69 %**

Grafik IV.C.2.1.4.
Komposisi Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
(dalam jutaan rupiah)



Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan piutang lainnya sebesar Rp5.612.000,00 di KPP Pratama Denpasar Barat dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang baru di setor pada awal Januari 2009 di Kantor Pusat DJP, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Pelunasan PNBP Tahun 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	DISETOR TANGGAL
1	Denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pemerintah atas nama PT. Mitra Infosarana	195,819,637	06-Jan-09
2	Denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pemerintah atas nama PT. Multi Informatika Solusindo	17,336,000	05-Jan-09
3	Denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pemerintah atas nama PT. Multi Informatika Solusindo	60,368,000	05-Jan-09
4	Denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pemerintah atas nama PT. Nusantara Compnet Integrator	242,841,800	08-Jan-09

C.2.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

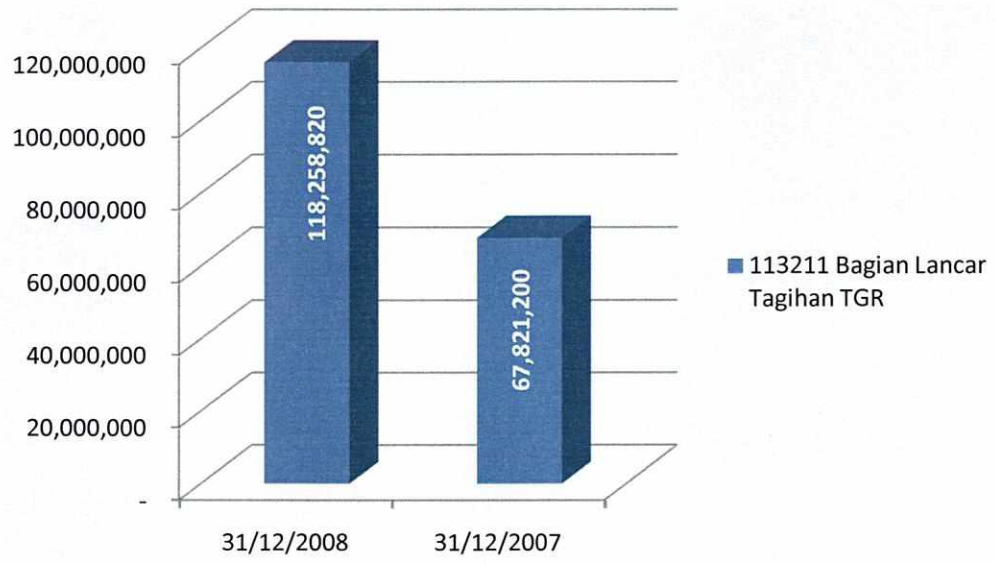
BL TGR

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp118.258.820,00 dan per 31 Desember 2007 sebesar Rp 67.821.200,00, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp 50.437.620,00.

Tabel IV.C.2.1.5.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2008	31/12/2007
Bagian Lancar Tagihan TGR	118.258.820	67.821.200
Jumlah	**118.258.820**	**67.821.200**

Grafik IV.C.2.1.5.
Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)



C.2.1.6 Persediaan

Persediaan

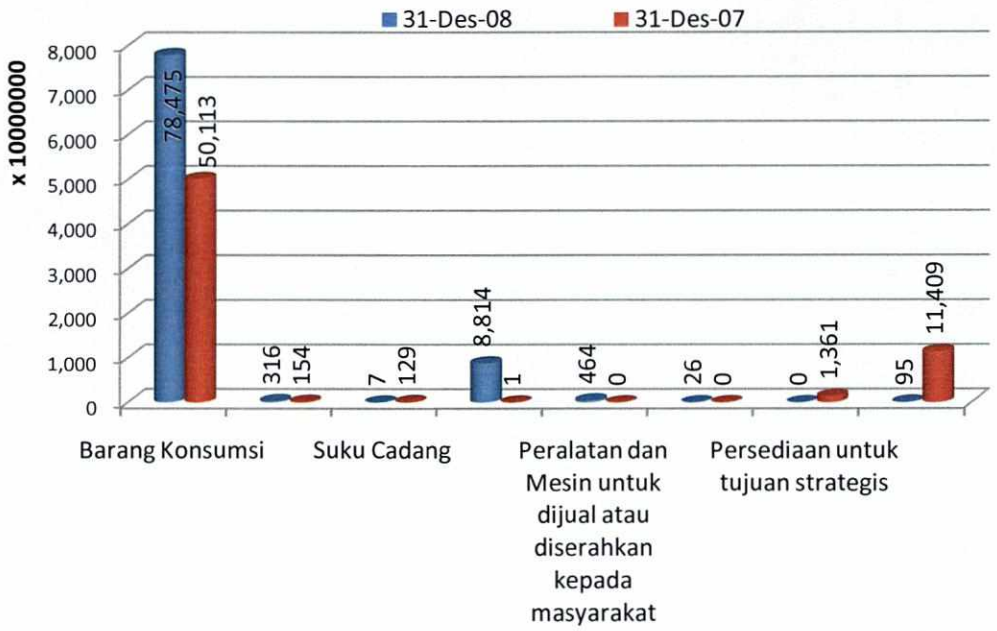
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp 63.168.558.601,00 sedangkan Jumlah Persedian per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 88.200.439.352,00 yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2008 sebesar Rp88.200.439.352,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6. dan Grafik IV.C.2.1.6. berikut:

Tabel IV.C.2.1.6.
Jenis Persediaan Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Des-08	31-Des-07	Kenaikan/ (penurunan)
Barang Konsumsi	78.475.446.374	50.113.060.969	28.362.385.405
Bahan Untuk Pemeliharaan	316.626.860	154.240.322	162.386.538
Suku Cadang	6.793.000	129.538.182	(122.745.182)
Pita Cukai, Materai dan Legas	8.814.239.125	1.036.000	8.813.203.125
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	464.933.802	0	464.933.802
Bahan Baku	26.399.492	0	26.399.492
Persediaan untuk tujuan strategis	140.000	1.361.340.790	(1.361.200.790)
Persediaan Lainnya	95.860.699	11.409.342.338	(11.313.481.639)
Jumlah	88.200.439.352	63.168.558.601	25.031.880.751

Grafik IV.C.2.1.6.
Komposisi Persediaan Per 31 Desember 2008
(dalam jutaan rupiah)



C.2.2. Aset Tetap

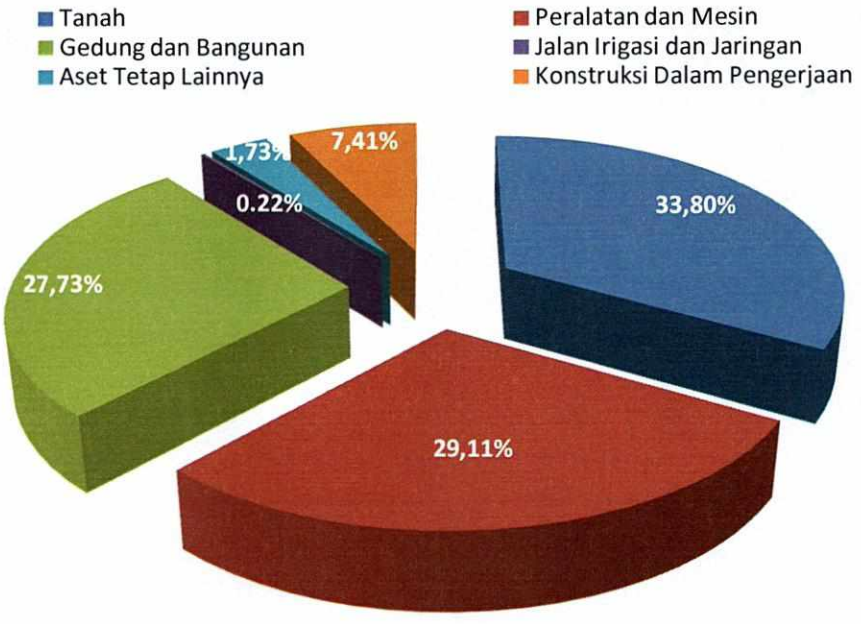
Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (depresiasi). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 11,053,404,592,040,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2008 menurut jenis aset tetap sebagaimana Tabel IV.C.2.2. dan Grafik IV.C.2.2.berikut:

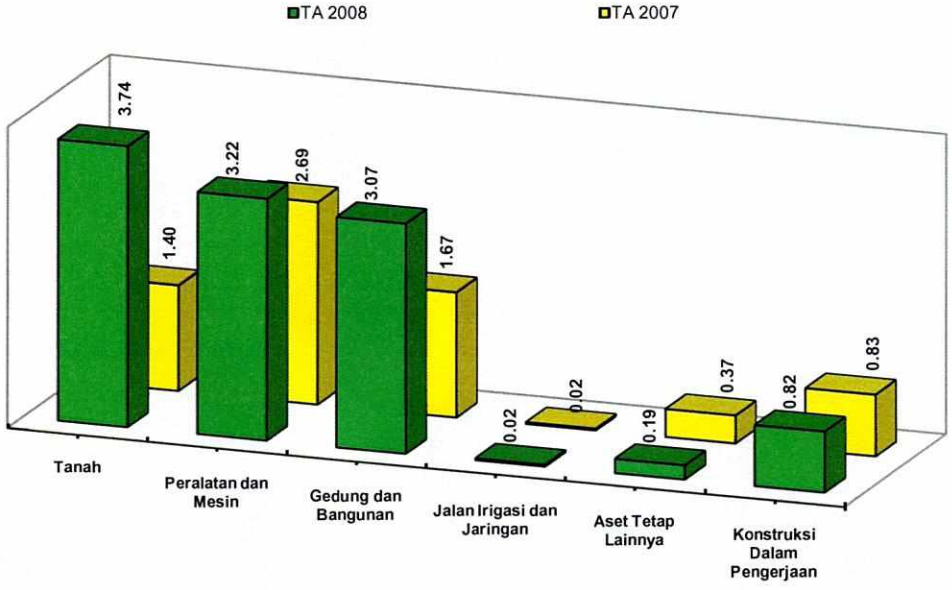
Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Des-08	31-Des-07	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	3,736,360,295,112	1,404,110,611,920	2,332,249,683,192
2	Peralatan dan Mesin	3,217,317,808,089	2,689,755,519,254	527,562,288,835
3	Gedung dan Bangunan	3,065,068,755,475	1,665,539,760,965	1,399,528,994,510
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,231,579,490	22,934,570,343	1,297,009,147
5	Aset Tetap Lainnya	191,293,118,826	374,736,959,252	(183,443,840,426)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	819,133,035,048	825,396,791,985	(6,263,756,937)
	Jumlah	**11,053,404,592,040**	**6,982,474,213,719**	4,070,930,378,321

Grafik IV.C.2.2.
Aset Tetap Per 31 Desember 2008 dan 2007



Grafik IV.C.2.2.1
Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam triliun rupiah)



Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset

Dalam tahun anggaran 2008 terdapat realisasi balanja modal neto sebesar Rp1.254.752.296.897,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MAK	URAIAN	REALISASI BELANJA
1.	531111	Belanja Modal Tanah	5.542.681.800
2.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.501.968.728
3.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.213.794.292
4.	534131	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.587.558.004
5.	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	73.906.294.073
JUMLAH			1.254.752.296.897

Selanjutnya, dalam mutasi tambah BMN, antara lain terdapat penambahan sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	Rp	653.371.739.168
Pengembangan /Penyelesaian Pembangunan (2008)	Rp	154.079.914.388
Pengembangan (Gabungan)	Rp	25.334.249.259
Penambahan Aset Tak Berwujud	Rp	61.560.361.145
Perolehan/Pengembangan KDP	Rp	362.198.109.043
Penerimaan Aset Renovasi	Rp	909.277.932
Jumlah	Rp	1.257.453.650.935
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	Rp	(2.747.059.038)

Selisih sebesar Rp2.747.059.038,00 tersebut, merupakan penambahan BMN yang pembiayaannya bersumber dari mata anggaran belanja barang.

Tanah

C.2.2.1 Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp3.736.360.295.112,00 Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap Kanwil dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.1 berikut:

Tabel IV.C.2.2.1
Rincian Aset Tetap – Tanah per Kanwil
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	32,870,609,613	299,456,080,387	0	332,326,690,000	911
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	11,098,977,341	57,182,917,239	495,945,000	67,785,949,580	510.74
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	13,072,570,174	91,707,400,102	16,433,951,218	88,346,019,058	575.81
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	17,830,356,162	69,856,282,505	15,588,933,679	72,097,704,988	304.35
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	8,654,067,088	93,763,082,386	224,018,000	102,193,131,474	1,080.87
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	29,414,000,938	36,157,858,336	5,274,189,437	60,297,669,837	105.00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	32,882,035,265	44,331,674,405	1,910,100,000	75,303,609,670	129.01
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	4,436,765,004	30,566,945,296	4,090,162,000	30,913,548,300	596.76
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	30,319,190,616	183,836,712,147	135,000,216	214,020,902,547	605.34
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	31,920,955,048	119,220,641,140	0	151,141,596,188	373.49
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	71,900,278,300	163,417,246,254	0	235,317,524,554	227.28
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	30,127,587,700	90,097,955,011	0	120,225,542,711	299.05
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	17,511,055,916	46,343,418,084	0	63,854,474,000	264.65
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	75,192,718,232	0	75,192,718,232	100.00
15	Kanwil DJP Banten	29,388,621,014	55,079,626,201	60,991,215	84,407,256,000	187.21
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	48,120,758,773	173,323,146,014	1,366,429,000	220,077,475,787	357.34
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	60,401,888,706	133,816,449,817	3,028,637,197	191,189,701,326	216.53
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	31,034,271,144	157,339,606,920	2,940,434,266	185,433,443,798	492.43
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	12,580,088,186	115,863,389,103	2,916,630,380	125,526,846,909	897.82
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	13,734,910,038	25,486,831,933	1,305,152,136	37,916,589,835	176.18
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	37,171,305,692	176,770,526,774	1,188,154,636	212,753,677,830	472.36
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	31,064,522,468	82,734,846,976	4,117,042,481	109,682,326,963	253.08
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	24,881,174,048	142,332,757,468	3,052,506,000	164,161,425,516	559.78
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	3,074,746,955	63,329,002,079	1,810,759,659	64,592,989,375	2,000.71
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	7,958,495,238	74,690,951,162	2,363,221,000	80,286,225,400	908.81
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	7,922,221,114	228,815,958,196	2,959,760,000	233,778,419,310	2,850.92
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	5,472,762,716	91,437,165,635	2,856,537,353	94,053,390,998	1,618.57
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3,040,099,349	94,618,113,656	19,823,619,212	77,834,593,793	2,460.26
29	Kanwil DJP Bali	32,217,559,937	40,986,460,033	11,363,927,970	61,840,092,000	91.95

30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	7,723,194,627	55,855,343,613	0	63,578,538,240	723.22
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	24,076,628,623	17,569,043,150	1,415,450,880	40,230,220,893	67.09
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
	Total	**711,901,697,793**	**3,131,180,150,254**	**106,721,552,935**	**3,736,360,295,112**	**425.40**

*) Saldo Tanah di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp 1.404.110.611.920, terdapat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp692.208.914.127 sehingga Saldo Awal per 1 Januari 2008 menjadi sebesar Rp 711.901.697.793, disebabkan oleh revaluasi aset tetap dan *up dating* data.

Mutasi tanah selama tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	**Rupiah**
Saldo Awal Tahun 2008	3.088.010	711,901,697,793
Penambahan Saldo Awal	227.262	442.610.480.770
Pembelian	8,301	5,542,681,800
Transfer Masuk	467,004	166,535,360,182
Reklasifikasi Masuk	5,414	5,822,250,000
Pertukaran	432	1,016,776,500
Perolehan Lainnya	1	59,314,000
Pengurangan Nilai Aset	-529	0
Pengembangan Nilai Aset	1	39,869,000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-92,882	156,078,441,768
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-31,098	2,340,169,221,810
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	1,125,724,000
Penghapusan	-1,211	-1,223,033,554
Transfer Keluar	-261,136	-85,911,421,717
Hibah (keluar)	-1,890	-22,610,000
Reklasifikasi Keluar	-8,562	-5,855,605,000
Koreksi Pencatatan	-13,958	-1,528,852,240
Penghentian Aset dari Penggunaan	0	0
Saldo Akhir Tahun 2008	0	3,736,360,295,112

Saldo akhir Aset Tetap - Tanah TA 2008 sebesar Rp3,736,360,295,112,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3,024,458,597,319,00 atau 425,40 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp711,901,697,793,00. Kuantitas Aset Tetap - Tanah TA 2008 per 31 Desember 2008 sejumlah 3.385.159 meter persegi. Terdiri atas 3.058.490 meter persegi Tanah Persil, 108.516 Tanah Non Persil, dan 218.153 meter persegi Lapangan.

Peralatan dan Mesin

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp3,217,329,008,089,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.
Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	548,315,265,232	673,741,645,356	558,185,041,226	663,871,869,362	18.51
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	17,077,778,634	48,837,321,592	3,057,165,594	62,857,934,632	268.07
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	64,596,329,013	41,774,906,064	33,814,153,956	72,557,081,121	12.98
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	57,977,884,137	54,228,711,334	28,170,335,964	84,036,259,507	44.95
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	62,256,826,162	17,517,260,136	4,274,688,636	75,499,397,662	21.27
6	Kanwil DJP Jambi	21,742,215,616	54,360,627,946	8,745,205,428	67,357,638,134	209.80
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	57,310,704,099	40,325,191,038	10,012,818,050	87,623,077,087	52.05
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	33,268,457,977	40,525,600,457	5,996,625,520	67,797,432,914	103.79
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	105,025,883,533	10,231,168,944	14,311,720,379	100,945,332,098	(4.56)
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	82,389,160,527	11,100,095,500	11,601,574,468	81,887,681,559	(0.61)
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	105,531,347,809	13,884,865,555	17,628,066,123	101,788,147,241	(3.55)
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	67,574,286,523	8,224,056,286	8,964,478,323	66,833,864,486	(1.10)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	53,507,631,004	9,869,454,251	3,507,994,722	59,869,090,533	11.89
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	62,156,528,844	8,518,433,045	15,214,014,496	55,460,947,393	(10.77)
15	Kanwil DJP Banten	72,403,909,164	11,320,504,975	10,866,297,812	72,858,116,327	0.63
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	117,084,248,151	22,595,869,063	18,988,249,038	120,691,868,176	3.16
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	117,954,378,717	21,985,046,747	12,223,445,221	127,715,980,243	8.28
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	122,846,527,281	41,182,718,130	32,957,310,096	131,071,935,315	6.72
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	76,335,417,326	19,565,881,462	9,810,840,429	86,090,458,359	12.78
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	24,616,621,167	16,676,500,723	1,825,126,051	39,467,995,839	60.63
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	112,906,851,410	13,731,545,091	15,598,443,481	111,039,953,020	(1.65)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	128,599,798,130	173,305,727,434	173,466,036,952	128,439,488,612	(0.12)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	126,396,967,872	18,327,729,573	14,618,466,474	130,106,230,971	2.93
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	24,375,115,905	33,722,234,783	8,099,417,515	49,997,933,173	105.73
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	36,891,023,674	45,664,619,780	7,561,150,059	74,994,493,395	103.29
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	50,016,742,133	22,626,937,651	13,956,858,394	58,686,821,390	17.33
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	88,301,439,500	39,341,957,949	20,332,528,036	107,310,869,413	21.53
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara,Tengah, Gorontalo,dan Maluku Utara	49,490,990,687	65,853,909,166	15,310,846,104	100,034,053,749	102.13
29	Kanwil DJP Bali	43,426,480,365	21,088,136,079	6,186,165,633	58,328,450,811	34.32
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	44,932,503,559	35,979,808,753	4,237,620,251	76,674,692,061	71.05
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	38,025,936,250	30,971,225,361	1,659,141,883	67,338,019,728	77.08
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	34,407,354,797	3,160,279,395	9,471,740,414	28,095,893,778	(18.36)
TOTAL		2,647,742,605,198	1,670,240,021,619	1,100,653,618,728	3,217,329,008,089	20.97

*) Saldo Peralatan dan Mesin di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp 2.689.755.519.254, terdapat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp 42.012.914.056 sehingga Saldo Awal per 1 Januari 2008 menjadi sebesar Rp 2.647.742.605.19, disebabkan oleh revaluasi aset tetap dan *up dating* data.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

MA	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp618.501.968.728
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp316.262.479.984
	Jumlah Belanja	Rp934.764.448.712

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Rincian transaksi mutasi nilai asset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

100	Saldo Awal 2008	2.647.742.605.198
100	Koreksi Saldo Awal Simak Bmn	57.149.843.741
101	Pembelian	645.985.961.524
102	Transfer Masuk	783.129.649.965
103	Hibah	2.692.164.257
104	Rampasan	0
105	Penyelesaian Pembangunan	2.494.020.000
106	Pembatalan Penghapusan	44.413.500
107	Reklasifikasi Masuk	154.309.184.700
108	Bangun Serah Guna	0
109	Bangun Guna Serah	0
110	Kerjasama Pemanfaatan	0
111	Pertukaran	0
112	Perolehan Laiinnya	293.919.200
188	Reklasifikasi Dr Aset Tetap Ke Aset Lainnya	0
201	Pengurangan Nilai Aset	-4.277.662.933
202	Pengembangan Nilai Aset	1.453.374.800
203	Koreksi Perubahan Kondisi	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai	-14.979.714.631
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-316.287.278.817
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	47.607.250
301	Penghapusan	-11.452.161.775
302	Tranfer Keluar	-511.952.930.795
303	Hibah (Keluar)	0
304	Reklasifikasi Keluar	-7.639.489.152
305	Koreksi Pencatatan Nilai	-200.760.274.596
501	Saldo Awal Kdp	0
502	Perolehan Kdp	0
503	Pengembangan Kdp	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-10.643.881.455
199	Reklas Dari Intra Ke Ekstra	34.931.430
399	Reklas Dari Ekstra Ke Intra	-55.273.322
Saldo Akhir 2008		3.217.329.008.089
Total Penambahan Aset		1.647.635.070.367
Total Pengurangan Aset		-1.078.048.667.476

Saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin TA 2008 sebesar Rp3,217,329,008,089,00 mengalami kenaikan sebesar Rp569,586,402,891,00 atau 21,51 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp2,647,742,605,198,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 sejumlah 616.830 buah, yang terdiri sebagian besar atas 138.928 buah Alat Kantor, 319.878 buah Alat Rumah Tangga, 61.146 buah komputer, 51.250 buah peralatan komputer, dan lain-lain.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin antara Neraca TA 2008 dengan Laporan BMN Intrakomptable per 31 Desember 2008 akan berbeda sebesar Rp11.200.000,00. Hal ini dikarenakan pada Neraca TA 2008 nilai Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp11.200.000,00 sebagai akibat adanya TGR pada Kanwil DJP Sumut I, sedangkan pada LBMN Intrakomptable per 31 Desember 2008 masih belum terkoreksi dikarenakan masih menunggu proses Surat Keputusan Penghapusan.

Gedung dan Bangunan

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp3,065,068,755,475,00 Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	89,493,495,920	369,795,898,050	230,555,944,391	228,733,449,579	156
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	21,091,607,700	58,907,159,197	367,552,723	79,631,214,174	278
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	24,705,998,664	68,358,780,603	25,036,892,965	68,027,886,302	175
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	26,861,259,334	40,254,041,678	22,715,096,511	44,400,204,501	65
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	33,948,521,470	28,976,936,439	238,679,890	62,686,778,019	85
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	32,347,553,193	28,080,371,563	5,266,822,026	55,161,102,730	71
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	27,649,327,505	81,416,291,257	529,510,500	108,536,108,262	293
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	36,607,834,347	23,675,513,662	3,637,847,543	56,645,500,466	55
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	85,812,892,229	290,172,159,928	17,386,306,256	358,598,745,901	304
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	36,176,088,094	37,636,837,029	153,804,800	73,659,120,323	104
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	85,284,019,694	54,784,608,786	1,951,719,811	138,116,908,669	62
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	33,832,266,906	32,124,227,893	175,189,000	65,781,305,799	94

13	Kanwil DJP Jakarta Utara	42,283,314,357	20,378,915,423	1,775,851,378	60,886,378,402	44
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	28,014,120,666	77,315,231,540	-	105,329,352,206	276
15	Kanwil DJP Banten	51,178,957,951	45,556,454,260	5,591,723,236	91,143,688,975	78
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	36,332,157,118	86,940,410,200	5,657,331,911	117,615,235,407	224
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	56,112,315,118	98,880,806,844	8,071,760,001	146,921,361,961	162
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	53,455,816,427	56,014,828,320	10,669,049,036	98,801,595,711	85
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	34,699,357,943	55,552,385,043	10,465,047,578	79,786,695,408	130
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	73,397,371,599	4,135,632,040	42,466,000	77,490,537,639	6
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	104,860,005,656	23,052,972,889	1,536,984,169	126,375,994,376	21
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	99,573,823,432	36,658,116,306	984,568,483	135,247,371,255	36
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	78,315,886,532	47,751,472,073	6,270,093,838	119,797,264,767	53
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	15,188,218,468	26,438,508,916	823,238,939	40,803,488,445	168
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	22,095,873,481	25,872,888,944	5,149,688,224	42,819,074,201	94
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	23,290,607,814	36,920,910,748	2,958,184,575	57,253,333,987	146
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	44,487,371,795	31,219,697,482	10,762,021,661	64,945,047,616	46
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	49,035,898,456	95,161,513,037	20,510,465,441	123,686,946,052	152
29	Kanwil DJP Bali	34,581,492,060	26,034,124,145	9,363,590,000	51,252,026,205	48
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	36,576,721,309	32,865,344,715	821,780,128	68,620,285,896	88
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	74,891,192,981	30,817,674,317	1,145,774,957	104,563,092,341	40
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	935,056,994	10,816,602,906	-	11,751,659,900	1,157
	TOTAL	1,493,116,425,213	1,982,567,316,233	410,614,985,971	3,065,068,755,475	105

*) Saldo Gedung dan Bangunan di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.665.539.760.965, terdapat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp 172.423.335.752 sehingga Saldo Awal per 1 Januari 2008 menjadi sebesar Rp 1.493.116.425.213 disebabkan oleh revaluasi aset tetap dan *up dating* data.

		Kuantitas	Nilai
A	**BANGUNAN GEDUNG**	**5,117**	**3.062.326.096.048**
	Uraian Transaksi Tidak Ada	**0**	**0**
	SALDO AWAL	4,578	1,492,832,965,289
1	Penambahan Saldo awal	959	103.441.794.434
2	Pembelian	7	658,076,000
3	Transfer Masuk	346	384,922,246,867
4	Penyelesaian Pembangunan	44	430,515,658,288
5	Pembatalan Penghapusan	1	2,964,511
6	Reklasifikasi Masuk	7	8,728,497,429
7	Bangun Serah Guna	1	34,812,800
8	Perolehan Lainnya	5	244,801,416
9	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya	17	861,279,000
10	Pengurangan Nilai Aset	0	-179,744,331
11	Pengembangan Nilai Aset	0	23.996.009.684
12	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	63,148,021,612
13	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0	868.337.159.753
14	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	26.092.446.769
15	Penghapusan	-18	-13,862,996,475
16	Transfer Keluar	-421	-312,500,943,802
17	Reklasifikasi Keluar	-340	-10,965,526,872
18	Koreksi Pencatatan	-61	-3.542.337.905

19	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra	0	0
20	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-8	-439.088.419
B	**BANGUNAN MENARA**	**0**	**0**
1	Transfer Masuk	0	0
C	**RAMBU-RAMBU**	**5**	**68,343,624**
	SALDO AWAL	2	45,080,624
1	Pembelian	1	12,914,000
2	Transfer Masuk	2	10,349,000
3	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0	0
4	Transfer Keluar	0	0
D	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	**98**	**2,674,315,803**
	SALDO AWAL	3	238,379,300
1	Penambahan Saldo Awal	79	637,221,053
2	Transfer Masuk	8	1,284,399,450
3	Penyelesaian Pembangunan	1	332,000,000
4	Perolehan Lainnya	7	182,316,000
	TOTAL		**3.065.068.755.475**

Saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan TA 2008 sebesar Rp3,065,068,755,475,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1,571,952,330,262,00 atau 105,28 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp1,493,116,425,213,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 sebanyak 5.220 unit, yang terdiri atas 2.081 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 3.036 unit unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 98 unit Tugu/Tanda Batas, dan lain-lain.

Jalan dan Jembatan

C.2.2.4 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp6.430.539.563,00. Rincian jumlah Jalan dan Jembatan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4 berikut:

Tabel IV.C.2.2.4
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				% NAIK (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	Instansi Pusat DJP	0	0	0	0	0
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0

4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	175.373.650	175.373.650	175.373.650	175.373.650	0
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	0	0	0	0	0
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	0	192.859.695	0	192.859.695	100
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	0	20.400.000	0	20.400.000	100
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	96.897.000	0	0	96.897.000	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	268.266.096	70.926.618	12.235.000	326.957.714	21
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	980.851.865	42.981.674	0	1.023.833.539	4
20	Kanwil DJP DIY	0	249.279.260	0	249.279.260	100
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	65.676.840	0	65.676.840	100
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	891.953.305	0	463.776.305	428.177.000	52
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
27	Kanwil DJP Sulselbartra	2.144.642.262	0	0	2.144.642.262	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	640.566.603	890.732.000	0	1.531.298.603	139
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
	TOTAL	**5.373.694.781**	**1.708.229.737**	**651.384.955**	**6.430.539.563**	19.67

Saldo akhir Aset Tetap – Jalan dan Jembatan TA 2008 sebesar Rp6,430,539,563.00 mengalami kenaikan sebesar Rp1,056,844,782,00 atau 19,67 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp5,373,694,781.00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2008 sejumlah 23.998 meter persegi terdiri atas 23.997 meter persegi Jalan dan 1 meter persegi jembatan.

Irigasi

C.2.2.5 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.568.610.956.00,00. Rincian jumlah Irigasi yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.5:

Tabel IV.C.2.2.5
Rincian Aset Tetap –Irigasi per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	62,149,681.00	14,945,789	0	77,095,470.00	24.05
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	119,788,768.00	124,679,000.00	0	244,467,768.00	104.08
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	34,181,960.00	19,178,500.00	0	53,360,460.00	56.11
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	256,505,000.00	5,564,000.00	0	262,069,000.00	2.17
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	0	47,264,000.00	0	47,264,000.00	100.00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	70,430,000.00	0	0	70,430,000.00	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	272,648,655.00	33,214,775.00	0	305,863,430.00	12.18
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	5,940,000.00	0	0	5,940,000.00	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	8,910,000.00	0	0	8,910,000.00	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0
15	Kanwil DJP Banten	2,900,000.00	0	0	2,900,000.00	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	30,892,000.00	0	0	30,892,000.00	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	65,174,000.00	0	0	65,174,000.00	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	136,792,271.00	1,554,636.00	77,298,300.00	61,048,607.00	(55.37)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10,170,000.00	0	0	10,170,000.00	0
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	21,349,950.00	0	0	21,349,950.00	0
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	13,440,000.00	0	6,000,000.00	7,440,000.00	(44.64)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	129,572,700.00	0	33,528,700.00	96,044,000.00	(25.88)
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
27	Kanwil DJP Sulselbartra	92,343,000.00	850,000.00	0	93,193,000.00	0.92
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	51,373,371.00	43,116,400.00	0	94,489,771.00	83.93
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	9,509,500.00	0	9,509,500.00	100.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
TOTAL		**1,385,561,356.00**	**299,876,600.00**	**116,827,000.00**	**1,568,610,956.00**	13.21

Saldo akhir Aset Tetap – Irigasi TA 2008 sebesar Rp1,568,610,956.00 mengalami kenaikan sebesar Rp183,049,600,00 atau 13,21 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp1,385,561,356.00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2008 sebanyak 74 unit, yang terdiri atas 12 unit Bangunan Air Irigasi, 17 unit Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, 26 unit Bangunan Air Bersih / Air Baku, 10 unit Bangunan Air Kotor, dan lain-lain.

Jaringan

C.2.2.6 Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2008 sebesar Rp16.232.428.971,00. Rincian jumlah Jaringan yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.6:

Tabel IV.C.2.2.6
Rincian Aset Tetap – Jaringan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	8,342,995,000.00	0	0	8,342,995,000.00	0
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	179,766,480.00	0	179,766,480.00	100.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	340,825,975.00	155,937,725.00	213,906,023.00	282,857,677.00	(17.01)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	455,768,210.00	210,345,000.00	254,913,000.00	411,200,210.00	(9.78)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	687,101,432.00	208,365,030.00	0	895,466,462.00	30.33
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	44,935,000.00	1,752,300.00	0	46,687,300.00	3.90
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	69,887,000.00	1,936,000.00	0	71,823,000.00	2.77
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	153,162,000.00	148,349,000.00	0	301,511,000.00	96.86
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27,213,908.00	0	0	27,213,908.00	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	21,230,000.00	0	0	21,230,000.00	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	616,369,000.00	0	0	616,369,000.00	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	175,445,026.00	0	0	175,445,026.00	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	197,938,700.00	0	0	197,938,700.00	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	17,517,356.00	0	17,517,356.00	0	(100.00)
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	50,077,416.00	0	0	50,077,416.00	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	128,323,700.00	17,374,000.00	0	145,697,700.00	13.54
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	40,139,288.00	32,719,000.00	0	72,858,288.00	81.51
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	298,590,000.00	0	293,000.00	298,297,000.00	(0.10)
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	41,950,000.00	0	0	41,950,000.00	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	38,012,600.00	0	2,000,000.00	36,012,600.00	(5.26)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	451,997,516.00	0	0	451,997,516.00	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	200,000.00	0	0	200,000.00	0

25	Kanwil DJP Kalselteng	27,034,500.00	406,012,453.00	0	433,046,953.00	1,501.83
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	70,000,000.00	18,534,450.00	17,000,000.00	71,534,450.00	2.19
27	Kanwil DJP Sulselbartra	7,000,000.00	0	0	7,000,000.00	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	48,200,000.00	1,859,621,000.00	0	1,907,821,000.00	3,858.13
29	Kanwil DJP Bali	393,978,243.00	0	0	393,978,243.00	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	4,801,000.00	82,081,992.00	0	86,882,992.00	1,054.84
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	593,874,250.00	70,696,800.00	0	664,571,050.00	11.90
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
	TOTAL	**13,344,567,120.00**	3,393,491,230.**00**	**505,629,379.00**	16,232,428,971.**00**	21.64

Saldo akhir Aset Tetap – Jaringan TA 2008 sebesar Rp16,232,428,971.00 mengalami kenaikan sebesar Rp2,887,861,851.00 atau 21,64 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp13,344,567,120.00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2008 sejumlah 513 unit, terdiri atas 257 unit Instalasi Gardu Listrik, 149 Instalasi lain, 19 Instalasi Pembangkit Listrik, serta 13 Instalasi Pengaman.

Aset Tetap Lainnya

C.2.2.7 Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp191,293,118,826,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.7 berikut:

Tabel IV.C.2.2.7
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURU)
1	Instansi Pusat DJP	367.716.088.758	-	184.065.167.582	183.650.921.176	-50,06
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	-	38.350.000	-	38.350.000	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	105.973.180	82.332.300	81.516.700	106.788.780	0,77
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.447.750	4.957.900	3.972.750	4.432.900	28,57
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	295.459.778	24.022.000	137	319.344.778	8,08
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	50.215.000	148.366.058	5	198.576.058	295,45
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	5.285	248.050.000	-	248.578.500	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	279.946.500	388.181.000	-	668.127.500	138,66
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	80.659.000	1.210.000	-	81.869.000	1,50
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	119.610.100	25.602.500	28.110.000	117.102.600	-2,10
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	26.870.000	-	20.570.000	6.300.000	-76,55
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	44.990.000	-	-	44.990.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
15	Kanwil DJP Banten	8.973.000	-	-	8.973.000	0,00

16	Kanwil DJP Jawa Barat I	770.946.929	6.650.000	105.305.479	672.291.450	-12,80
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	59.100.000	7.810.000	49.500.000	17.410.000	-70,54
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	85.201.800	2.434.000	5.752.300	81.883.500	-3,89
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	971.413.582	12.638.000	470.082.582	513.969.000	-47,09
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	5.940.000	-	5.940.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.548.951.488	191.603.000	-	1.740.554.488	12,37
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	40.986.600	11.954.800	9.669.000	43.272.400	5,58
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.389.137.640	520	131.370.000	1.258.287.640	-9,42
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	24.671.680	-	24.671.680	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	35.950.560	9.000.000	-	44.950.560	25,03
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	125	125	125	125	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat Selatan dan Tenggara	15.247.000	49.900.000	95	65.052.000	326,65
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	170.420.300	872.787.634	80.718.000	962.489.934	464,77
29	Kanwil DJP Bali	56.395.640	27.500.000	-	83.895.640	48,76
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	4.000.000	52.004.854	-	56.004.854	1300,12
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	222.196.388	500	-	222.696.388	0,23
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5.270.000	-	-	5.270.000	0,00
Total		374.108.104.493	2.237.110.726	185.052.096.393	191.293.118.826	-48,87

*) Saldo Aset Tetap Lainnya di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp.374.736.959.252, terdapat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp628.854.759 sehingga Saldo Awal per 1 Januari 2008 menjadi sebesar Rp 374.108.104.493 disebabkan oleh *up dating* data.

Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya TA 2008 sebesar Rp191,293,118,826.00 mengalami penurunan sebesar Rp182,814,985,667,00 atau 48,87 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp374,108,104,493,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2008 sejumlah 1.509 buah yang terdiri atas 597 buah aset tetap lainnya - eksakta, 325 buah aset tetap lainnya - non eksakta, 301 buah Koleksi Barang-barang Perpustakaan/Non Buku, 243 buah Barang Bercorak Kesenian, dan lain-lain.

KDP

C.2.2.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp819.133.035.048,00. Rincian KDP per kantor wilayah adalah sebagai berikut Tabel IV.C.2.2.8:

Tabel IV.C.2.2.8
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	602.168.693.099	268.972.108.250	224.307.356.600	646.833.444.749	107,42 %
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00%
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	55.905.507.798	0	55.905.507.798	0,00%
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	12.941.661.801	8.358.090.547	4.583.571.254	0,00%

5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00%
6	Kanwil DJP Jambi	0	0	0	0	0,00%
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	56.521.295.400	56.521.295.400	0	0,00%
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00%
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00%
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00%
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00%
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00%
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00%
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00%
15	Kanwil DJP Banten	0	39.536.336.420	39.536.336.420	0	0,00%
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	26.044.037.121	26.044.037.121	0	0,00%
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	50.105.858.661	33.461.818.700	16.644.039.961	70,93%
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	830.172.000	830.172.000	0	0,00%
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	22.585.635.262	10.235.521.000	12.350.114.262	0,00%
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00%
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00%
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	20.476.271.684	13.904.980.600	6.571.291.084	8,85%
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	28.012.443.800	28.012.443.800	0	0,00%
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00%
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	801.390.255	0	801.390.255	0,00%
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	1.325.717.500	0	1.325.717.500	0,00%
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	0	7.950.183.740	0	7.950.183.740	0,00%
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	2.494.020.000	2.494.020.000	0	0,00%
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00%
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	9.952.946.526	1.890.624.290	0	11.843.570.816	119,00 %
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	31.039.794.600	23.284.409.029	0	54.324.203.629	209,42 %
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00%
	TOTAL	825.396.791.985	549.478.445.308	586.016.379.164	819.133.035.048	0,76%

Saldo akhir Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2008 sebesar Rp819.133.035.048,00 mengalami penurunan sebesar Rp6,263,756,937,00 atau 0,76 persen dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp825.396.791.985,00.

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas perolehan harta tak berwujud seperti tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh karyawan.

C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun 2008 tidak melaksanakan penjualan secara angsuran dan tidak mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2008.

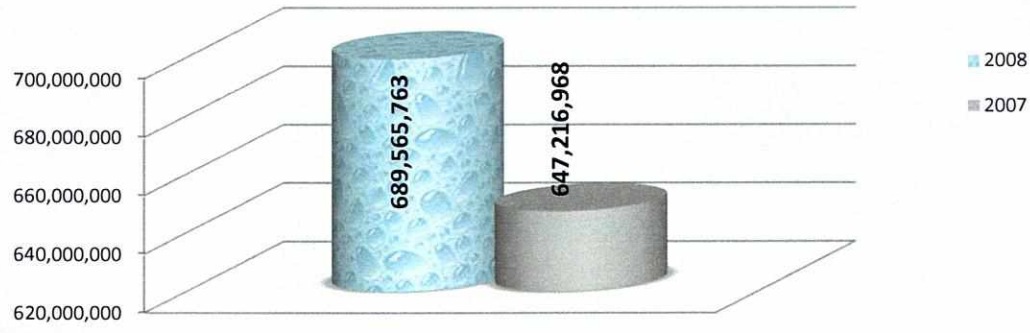
C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp647.216.968,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.348.795,00 sehingga Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp689.565.763,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana Lampiran G.

Tabel IV.C.2.3.2
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember TA 2008 dan TA 2007
(dalam rupiah)

Perkiraan	2008	2007	Kenaikan (penurunan)
Tuntutan Perbendaharaan/TGR	689.565.763	647.216.968	42.348.795
Total	689.565.763	647.216.968	42.348.795

Grafik IV.C.2.3.2
Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)



C.2.3.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun 2008 tidak melakukan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan tidak mempunyai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2008.

C.2.3.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2007 tidak ada; Aset Tetap Tak berwujud per 31 Desember 2008 sebesar Rp83.231.383.947,00. Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.4 berikut:

Tabel IV.C.2.3.4
Rincian Aset Lainnya– Aset Tak Berwujud per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	-	110,062,316,531	31,026,109,070	79,036,207,461	0
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	-	385,357,688	-	385,357,688	0
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-	0
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	22,344,300	-	22,344,300	0
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	-	0
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	49,524,900	-	49,524,900	0
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	-	29,054,300	-	29,054,300	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	-	22,939,000	-	22,939,000	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	48,196,500	-	48,196,500	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	268,737,500	-	268,737,500	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	214,023,840	-	214,023,840	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	59,977,250	-	59,977,250	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	-	173,013,530	-	173,013,530	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	60,527,500	-	60,527,500	0
15	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-	0
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	0
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	10,345,500	-	10,345,500	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	-	0
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	374,358,370	-	374,358,370	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	47,724,080	-	47,724,080	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	1,503,296,100	-	1,503,296,100	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	-	-	-	0
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	-	-	-	-	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	-	380,053,201	-	380,053,201	0
29	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	384,646,512	-	384,646,512	0
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	-	136,845,415	-	136,845,415	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	24,211,000	-	24,211,000	0
Total		**-**	**114,257,493,017**	**31,026,109,070**	**83,231,383,947**	0

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 sebesar Rp83,231,383,947.00, saldo akhir per 31 Desember 2007 sebesar Rp0,00. Meskipun tidak ada saldo awal aset tak berwujud, saldo akhir sebesar Rp83,231,383,947.00 tersebut, diperoleh mulai dari tahun 2006 s.d. 2008. Hal ini terjadi karena secara sistem aset tak berwujud dapat dicatat sebagai Barang Milik Negara mulai tahun 2008.

C.2.3.5 Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2008 sebesar Rp11,256,715,131,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.5 berikut:

Tabel IV.C.2.3.5
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	-	-	-	-	0
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	-	66,625,600	66,625,600	-	0
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	382,763,544	-	382,763,544	0
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-	0
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	-	0
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	-	-	-	0
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	0
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	-	-	-	-	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	187,475,638	-	187,475,638	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	748,220,177	-	748,220,177	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	-	438,355,515	-	438,355,515	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	1,045,197,301	-	1,045,197,301	0
15	Kanwil DJP Banten	-	114,313,147	-	114,313,147	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	2,388,961,967	-	2,388,961,967	0
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	0
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	69,281,000		69,281,000	0
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	898,755,128	-	898,755,128	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	1,233,926,688	-	1,233,926,688	0

23	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	11,330,000	-	11,330,000	0
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	273,163,943		273,163,943	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	-	-	-	0
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	-	-	-	0
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	-	3,160,635,422	-	3,160,635,422	0
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	-	-	-	-	0
29	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-	0
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	-	-	-	-	0
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	304,335,661	-	304,335,661	0
Total		**-**	**11,323,340,731**	**66,625,600**	**11,256,715,131**	0

Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan TA 2008 sebesar Rp11,256,715,131.00 mengalami kenaikan sebesar Rp11,256,715,131.00 dari saldo akhir TA 2007 sebesar Rp0,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2008 sejumlah 10.547 buah yang terdiri atas 2 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 4 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 87 Alat Angkutan Darat Bermotor, 13 Alat Angkutan Darat tak Bermotor, 2.483 buah Alat Kantor, 6.371 Alat Rumah Tangga, 474 buah Komputer, 632 buah Peralatan Komputer, dan lain-lain.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

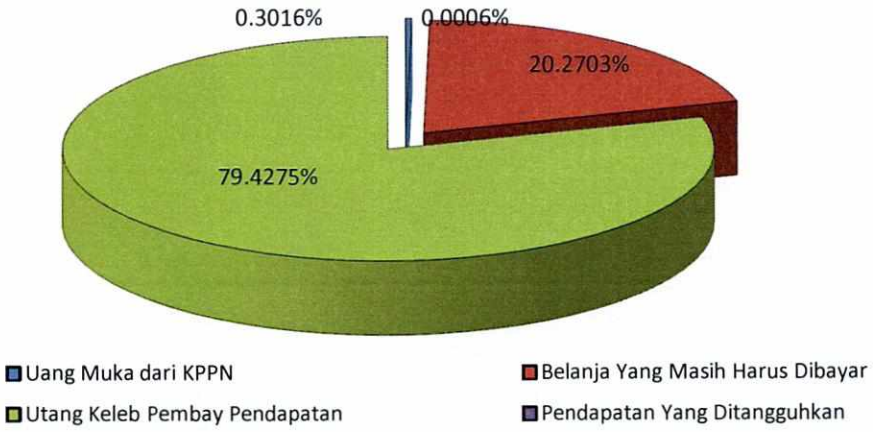
Kewajiban

Jumlah Utang per 31 Desember 2008 sebesar Rp 313,267,702,980,00. Utang ini terdiri dari Uang Muka dari KPPN, Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Rincian Utang disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.a., Tabel IV.C.2.4.b. dan Grafik IV.C.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.4.a
Posisi Utang Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008
Uang Muka dari KPPN	944.963.095
Utang kepada Pihak Ketiga	63.500.181.137
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	248.820.736.013
Pendapatan Yang Ditangguhkan	1.822.735
Jumlah	**313.267.702.980**

Grafik IV.C.2.4.
Komposisi per Jenis Utang Per 31 Desember 2008
(dalam prosentase)



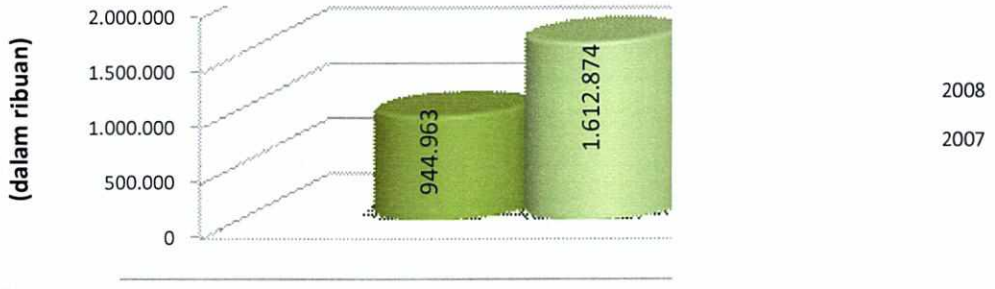
Tabel C.2.4.b
Posisi Utang Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Perkiraan	31-12-2008	31-12- 2007	Kenaikan/ Penurunan
Uang Muka dari KPPN	944.963.095	1.612.873.685	(667.910.590)
Utang kepada Pihak Ketiga	63.500.181.137	0	63.500.181.137
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	248.820.736.013	0	248.820.736.013
Pendapatan Yang Ditangguhkan	1.822.735	0	1.822.735
Jumlah	**313.267.702.980**	**1.612.873.685**	**311.654.829.295**

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.612.873.685 sedangkan jumlah per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp944.963.095,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

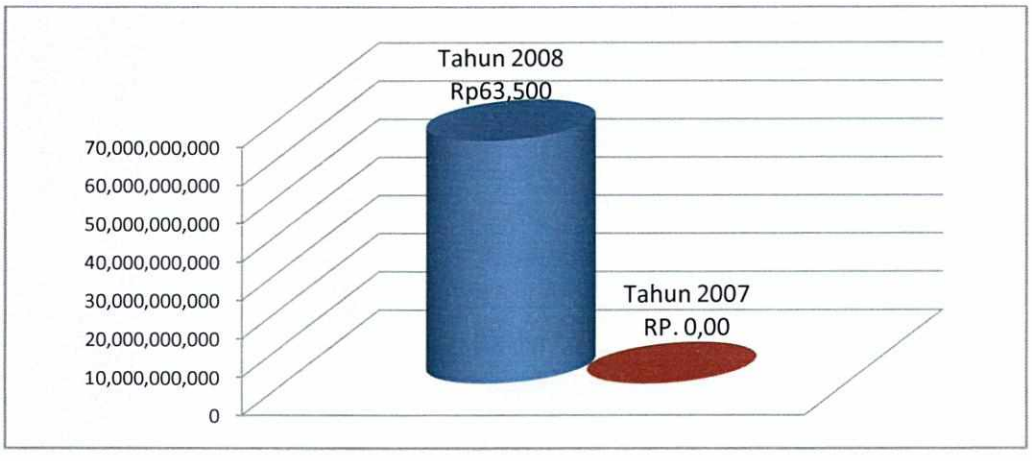
Grafik IV.C.2.4.1.
Perbandingan Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam ribuan rupiah)



C.2.4.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp63.500.181.137,00. Jumlah tersebut merupakan SPM Imbalan Bunga yang belum diterbitkan SP2D-nya per 31 Desember 2008.

Grafik IV.C.2.4.2.
Utang kepada Pihak Ketiga TA 2008 dan TA 2007
(dalam jutaan rupiah)



C.2.4.3 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp248.820.736.013,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah SPM-KP per 31 Desember 2008 belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.3.a dan Tabel IV.C.2.4.3.b berikut:

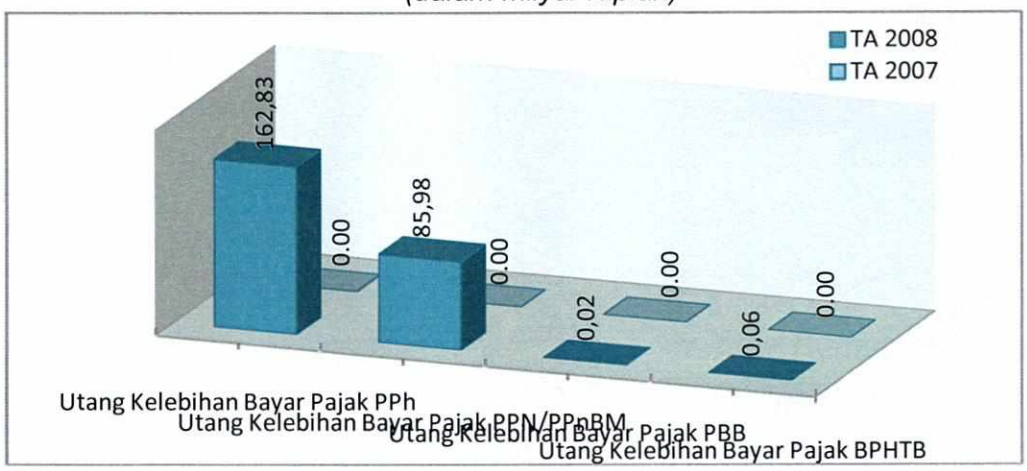
Tabel IV.C.2.4.3.a
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Jenis Utang	Jumlah
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	162.829.357.506
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	85.982.655.857
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.617.507
Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB	6.105.143
Jumlah	**248.820.736.013**

Tabel IV.C.2.4.3.b
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Jenis Utang	2008	2007	Kenaikan/ Penurunan
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	162.829.357.506	0	162.829.357.506
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	85.982.655.857	0	85.982.655.857
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.617.507	0	2.617.507
Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB	6.105.143	0	6.105.143
Jumlah	**248.820.736.013**	0	**248.820.736.013**

Grafik IV.C.2.4.3.
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam milyar rupiah)



C.2.4.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008 Rp1.822.735,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2008. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan.

Tabel IV.C.2.4.4
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Perkiraan	2008	2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp1.822.735,00	0	Rp1.822.735,00	100%
Jumlah	Rp1.822.735,00	0	Rp1.822.735,00	100%

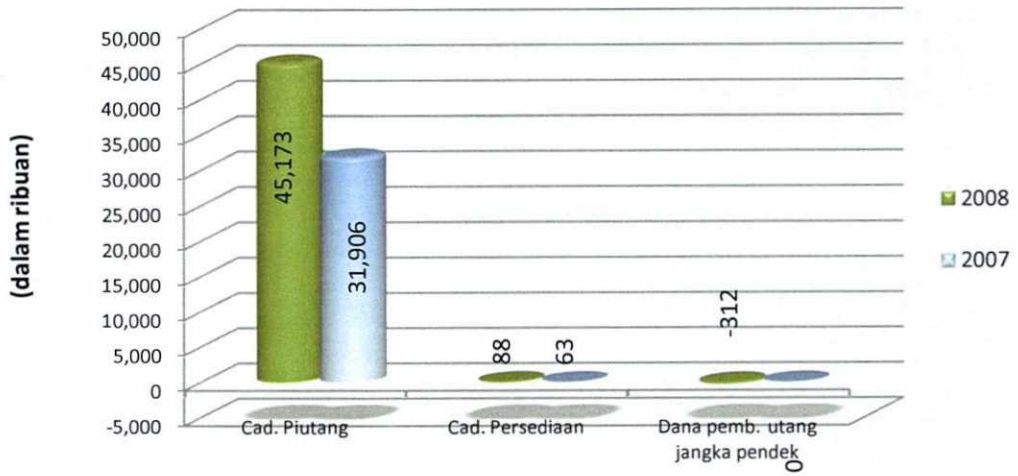
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2007 sebesar Rp31.970.063.946.361,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp44.949.759.227.770,00 yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri atas :

Cadangan Piutang	Rp	45.173.879.705.568,00
Cadangan Persediaan	Rp	88.200.439.352,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	-312.320.917.150,00

Grafik IV.C.2.5.
Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam milyar rupiah)



C.2.5.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 Rp45.173.879.705.568,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Cadangan Piutang Pajak Rp45.173.077.395.397.00 dan (2) Cadangan Piutang Bukan Pajak Rp684.051.351,00 serta (3) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp118.258.820,00.

Tabel IV.C.2.5.1
Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)

Perkiraan	31-Des-08	31-Des-07	Kenaikan/ Penurunan
Cadangan Piutang Pajak	45.173.077.395.397	31.906.597.010.360	13.266.480.385.037
Cadangan Piutang Bukan Pajak	684.051.351	230.556.200	453.495.151
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR	118.258.820	67.821.200	50.437.620
Jumlah	45.173.879.705.568	31.906.895.387.760	13.266.984.317.808

Grafik IV.C.2.5.1
Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)



C.2.5.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp63.168.558.601,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp88.200.439.352,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

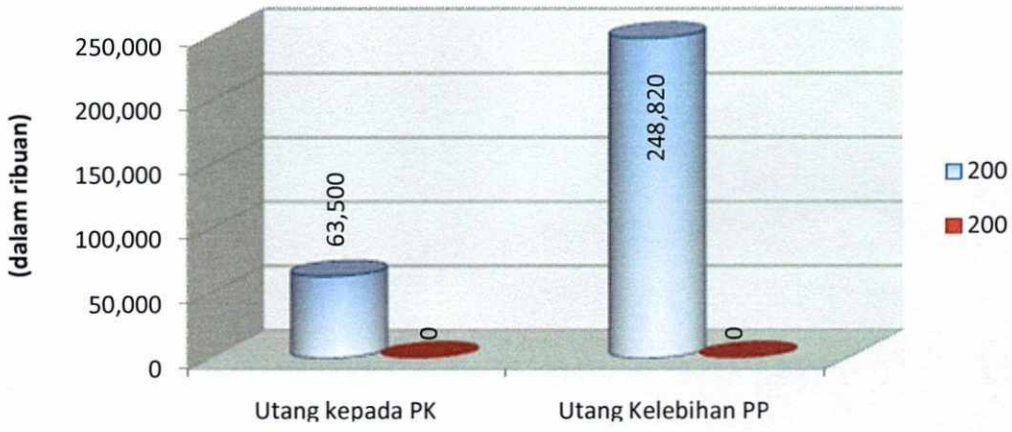
C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek Rp312.320.917.150,00. Jumlah tersesebut merupakan nilai akun penyeimbang dari (1) Utang kepada Pihak Ketiga Rp63.500.181.137,00 dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp248.820.736.013,00.

Tabel IV.C.2.5.3.
Dana YHDUPUJP Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Perkiraan	31-Des-08	31-Des-07	Kenaikan / Penurunan
Utang kepada Pihak Ketiga (UKPK)	63.500.181.137,00	0	63.500.181.137,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	248.820.736.013,00	0	248.820.736.013,00
Jumlah	312.320.917.150,00	0	312.320.917.150,00

Grafik IV.C.2.5.3.
Perbandingan Dana YHDUPUJP Per 31 Desember TA 2008 dan 2007
(dalam Jutaan rupiah)



C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2008 yang terdiri atas :

- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 11.053.404.592.040,00
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp 95.177.664.841,00

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp11.053.404.592.040,00. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tanah Rp3.736.360.295.112 (2) Peralatan dan Mesin Rp3.217.317.808.089,00 (3) Gedung dan Bangunan Rp3.065.068.755.475,00 (4) Jalan Irigasi dan Jaringan Rp24.231.579.490,00 (5) Aset Tetap Lainnya Rp191.293.118.826,00 dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp819.133.035.048,00.

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp95.177.664.841,00. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp689.565.763,00 (2) Aset Tak Berwujud, Rp83.231.383.947.00, dan (3) Aset Lain-lain Rp11.256.715.131.00.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Penatausahaan Aset

1. **Revaluasi Aset**. Tahun 2008 dilakukan kegaitan revaluasi aset untuk aset di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang dilaksanakan pihak DJKN. Dari 544 satuan kerja yang menyampaikan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 46 satuan kerja yang belum selesai dilakukan revaluasi termasuk satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sedang dalam proses penyelesaian, sehingga nilai aset yang disajikan dalam neraca belum memperhitungkan nilai seluruh hasil revaluasi.

2. **Tanah**. Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.280.108,05 m2 yang terbagi menjadi 1.727 bidang tanah. Dari 1.727 bidang tanah tersebut, terdapat sebanyak 409 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
   b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
   c. KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

3. **Penertiban Rumah Dinas** *(Bangunan Tempat Tinggal)*. Dari 3.036 unit Bangunan Tempat Tinggal di laingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya–upaya pengamanan baik secara administrastif maupun secara hukum. Upaya-upaya tersebut antara lain:
   a. Upaya Administratif, yaitu :
      1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
      2) Peneribitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
      3) Penetapan status rumah negara di wilayah DKI menjadi Rumah Negara Golongan I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 856/KM.1/2008 tanggal 15 Desember 2008.
   b. Upaya Pengosongan Rumah Dinas Secara Paksa,
   c. Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI T.A. 2007

Temuan BPK-RI atas LKPP Kementerian KeuanganTahun 2007 yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah:

   - Penyempurnaan aplikasi MPN, terutama untuk menghilangkan duplikasi dengan mengaktifkan data tanggal dan jam kirim transaksi, nomor urut pengiriman message dan kode bank sehingga memberikan informasi data transaksi yang unik.
   - Menyempurnakan aplikasi perekaman data pembayaran pajak melalui potongan SPM oleh KPPN, penerimaan PPh migas dan penerimaan pajak dalam bentuk valas oleh Bank Indonesia. Sehingga transaksi penerimaan pajak tersebut dapat dibukukan pada satuan kerja dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Piutang Pajak sebesar Rp 36.387,94 miliar yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah:

   - Membuat Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang didalamnya mengatur tatacara rekonsiliasi internal data piutang pajak untuk semua tingkatan Unit Akuntasi., mulai dari tingkat Satker, Wilayah dan Pusat.
   - Melanjutkan validasi data tunggakan pajak sesuai dengan SE-01/PJ.045/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Tanggapan atas Temuan BPK

D.2 TEMUAN DAN TANGGAPAN DJP ATAS TEMUAN BPK-RI T.A. 2008

Temuan BPK-RI atas LKPP Kementerian KeuanganTahun 2008 yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal salah klasifikasi sebesar Rp326,60 Milyar. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

   Dari Jumlah sebesar Rp316.262.479.984 berdasarkan hasil verifikasi oleh DJP, jumlah realisasi belanja barang yang dapat di kapitalisasi sebesar Rp2.261.649.234 dan sudah dimasukkan ke SIMAK BMN, sisanya merupakan belanja barang operasional lainnya.

2. Penerimaan Perpajakan DJP sebesar Rp2,99 Trilyun tidak dapat direkonsiliasi dengan SAU dan selisih sebesar Rp210,37 milyar antara SAi dan LAK atas penerimaan perpajakan DJBC tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

Keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah data pembayaran pajak melalui MPN. Jumlah data pembayaran pajak melalui MPN tersebut tahun 2008 terdiri dari 28.435.338 transaksi dengan nilai nominal Rp467,321,016,027,123.00. Selanjutnya dalam rangka menyakini setiap transaksi penerimaan pajak tersebut telah didukung dengan jumlah uang yang masuk ke Kas Negara, data transaksi penerimaan pajak tersebut dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan membandingkan *data base* MPN dengan *data base* transaksi penerimaan pajak yang dibukukan sebagai penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan struktur *data base* yang tersedia di MPN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, rekonsiliasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan rekonsiliasi sebagai berikut:

Uraian	DJP		BPK-RI	
	SSP	Nominal	SSP	Nominal
Data Transaksi MPN	**28,435,938**	**467,321,016,027,123**	**28,435,938**	**467,321,016,027,123**
Hasil Rekonsiliasi:				
Tahap I	26,424,519	441,930,047,756,805	26,424,519	441,930,047,756,805
Tahap 2	1,907,834	17,491,629,128,370	1,907,834	17,491,629,128,370
Tahap 3	13,489	707,728,940,924	13,489	707,728,940,924
Tahap 4	60,676	5,976,994,758,175	25,783	4,199,104,079,645
Jumlah Data MPN Terekonsilisasi	**28,406,518**	**466,106,400,584,274**	**28,371,625**	**464,328,509,905,744**
JumlahData MPN Belum Terekonsiliasi	**29,420**	**1,214,615,442,849**	**64,313**	**2,992,506,121,379**

Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat jumlah penerimaaan pajak yang dapat terekonsiliasi sebanyak 28,406,518 transaksi dengan nominal Rp466,106,400,584,274.00 dan sebanyak 29,420 transaksi dengan nomnal 1,214,615,442,849.00 yang belum terekonsiliasi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI penerimaaan pajak yang dapat terekonsiliasi sebanyak 28,371,625 transaksi dengan nominal Rp464,328,509,905,744.00 dan sebanyak 64,313 transaksi dengan nominal 2,992,506,121,379.00 yang belum terekonsiliasi.

3. Piutang Pajak dan Piutang PNBP DJBC sebesar Rp281,75 milyar serta penihilan piutang pajak sebesar Rp 747,76 milyar tidak didukung dokumen sumber yang valid. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

   a. Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tersebut telah dikirimkan surat dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kanwil DJP nomor S-38/PJ.045/2009 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Temuan BPK Mengenai Piutang Pajak Saldo Negatif dan S-11/PJ.045/2009 tentang Rekonsiliasi Data Piutang Pajak.
   b. Dari hasil surat tersebut telah diterima respon dari semua KPP terkait, dengan membuat revisi Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pajak Saldo Negatif.
      Dalam revisi Berita Acara Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Saldo Negatif setelah dilakukan penelitian ulang yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penagihan,

Kepala Subbagian Umum dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, terjadi perubahan alasan penihilan saldo negatif, yaitu:

Alasan Penihilan Sebelum Revisi	Alasan Penihilan Sesudah Revisi
1. Tidak dapat ditelusuri 2. Masih/akan ditelusuri 3. Tidak ditemukan bukti pendukung 4. Berdasarkan Surat Edaran atau SAP 5. Tidak mencantumkan alasan 6. Diterima data Seksi Penagihan 7. Hasil rekonsilisasi 8. Kurang tertib administrasi	1. Kesalahan pencatatan piutang yang lebih kecil dari yang sebenarnya 2. SSP Pbk yang diterima Seksi Penagihan sebelum SKP/STP 3. Pencatatan pembayaran lebih dari satu kali 4. Kesalahan dalam pencatatan pembayaran

c. Seluruh revisi Berita Acara Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Saldo Negatif beserta dokumen terkait sebanyak 91 (sembilan puluh satu) set telah diserahkan pada Tim BPK pada tanggal 22 April 2009.

4. Hasil revaluasi aset tetap sebesar Rp2,10 trilyun belum dicatat, aset tetap minimal sebesar Rp1,95 trilyun dan aset tetap pada 42 satker di DJP belum direvaluasi. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

   Sehubungan dengan temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat 42 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak belum dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penelitian hanya 27 satker yang belum dilakukan revaluasi, sedangkan 15 satker lainnya merupakan satker baru yang tidak mempunyai aset tetap yang perolehannya sebelum tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditrektorat Jenderal Pajak akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara agar satuan kerja tersebut segera dilakukan penilaian.

5. Penatausahaan dan pengamanan Aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan minimal sebesar Rp522,13 milyar belum memadai. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

   Sehubungan dengan temuan Tim Pemeriksa tersebut dapat dijelaskan langkah-langkah yang dilaksankanan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

   a. Aset Tanah yang Tidak Didukung oleh Bukti Kepemilikan

      Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.280.108,05 m2 yang terbagi menjadi 1.727 bidang tanah. Dari 1.727 bidang tanah tersebut, terdapat sebanyak 409 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

      1) Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
      2) Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
      3) KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

   b. Rumah Dinas/Negara Ditempati oleh Pihak Ketiga

      Dari 3.036 unit Bangunan Tempat Tinggal di laingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak

telah melakukan upaya–upaya pengamanan baik secara administrastif maupun secara hukum. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1) Upaya Administratif, yaitu :
   a) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
   b) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
   c) Penetapan status rumah negara di wilayah DKI menjadi Rumah Negara Golongan I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 856/KM.1/2008 tanggal 15 Desember 2008.
2) Upaya Pengosongan Rumah Dinas Secara Paksa,
   Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

6. Software perolehan sebelum tahun 2007 belum diakui sebagai aset tak berwujud. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

   Sehubungan dengan temuan Tim Pemeriksa BPK-RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Dalam Laporan Keuangan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 Audited telah disajikan data perolehan aset tak berwujud sampai dengan tahun 2007 dari sebesar Rp64.835.002.635,00 (*unaudited*) menjadi sebesar Rp83.231.383.947,00 (*audited*).
   b. Terhadap aset tak berwujud di lingkungan KPDJP yang belum tercatat, akan dibentuk Tim Inventarisasi Aset pada Satker KPDJP untuk menginventaris aset tidak berwujud dimaksud yang perolehannya dibawah tahun 2006 untuk kemudian akan dicatat sebagai penambahan saldo awal pada aplikasi SIMAK-BMN.

D.3 REKENING PEMERINTAH

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 5.157 rekening di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rekening tersebut terdiri-dari 991 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 472 rekening ditutup dan 3.694 rekening bank tempat penampungan PBB (Bank TP-PBB) sebagaimana Tabel D.3.

Tabel D.3.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	991	9.133.175.718
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	472	279.880.175
Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB)	3.694	N.A
Jumlah	5.157	9.413.055.893

Daftar rekening Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup, dan Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB) sebagaimana Lampiran D.2. sampai dengan D.4.